



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JL. K. S. TUBUN NO. 36 PONTIANAK
TELEPON : 0561-733466-733444 FAKSIMILI : 0561-732029

Nomor : S- 472 /WPB.16/2016 16 September 2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) Tahun 2015 (Audited)

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt 2
JI Budi Utomo No 6 Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-41/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK-TW dan LSKPU-TW pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berikut ini kami sampaikan laporan dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

1. LKPK-TW (Audited) Tahun 2015, yang merupakan konsolidasian dari LKPP-TW (Audited) dan LKPD-K (Audited) Tahun 2015 yang selanjutnya dimapping ke dalam akun GFS sehingga menghasilkan LSKPU-TW (Audited) Tahun 2015.
2. LKPP-TW dan LSKP-TW (Audited) Tahun 2015 disusun berdasarkan data konsolidasian dari 6 (enam) LK-KBUN-D dan 761 (tujuh ratus enam puluh satu) LK-Satker di Provinsi Kalimantan Barat.
3. LKPD-K dan LSKPD (Audited) Tahun 2015 disusun berdasarkan data konsolidasian dari 15 (lima belas) LK Pemda, yang terdiri dari 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota dan 12 (dua belas) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Laporan dalam bentuk *soft copy* telah dikirim melalui email ke alamat gfs.kanwil@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Supendi
NIP 196702061987031002



KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LKPK-TW dan LSKPU-TW TAHUN 2015 (AUDITED)



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Grafik.....	li
Daftar Singkatan	lii
Daftar Lampiran.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	7
Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	9
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	11
Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	12
Laporan Arus Kas Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	13
Metadata.....	15
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	18
A. Penjelasan Umum.....	18
A.1. Dasar Hukum.....	18
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A.3. Kebijakan Akuntansi dan Eliminasi Akun Timbal Balik.....	25
B. Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah.....	29
B.1 Penjelasan Atas Pos Penerimaan Konsolidasian.....	29
B.2 Penjelasan Atas Pos Belanja Konsolidasian.....	31
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca Konsolidasian.....	35
C.1. Aset Konsolidasian.....	35
C.2. Kewajiban Konsolidasian.....	46
C.3 Ekuitas Dana Konsolidasian.....	48
C.4. Eliminasi Akun Resiprokal.....	48
D. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Sektor Pemerintah Umum	49
D.1. Statistik Keuangan Pemerintah.....	49
D.2. Pendekatan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah.....	50
D.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.....	51

DAFTAR GRAFIK

1. Perbandingan Penerimaan Konsolidasian Tahun 2015 dan 2014.....	28
2. Komposisi Penerimaan Konsolidasian Tahun 2015	30
3. Perbandingan Belanja Konsolidasian per Jenis Belanja Tahun 2015 dan 2014.....	31
4. Komposisi Belanja Konsolidasian berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015.....	24
5. Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015.....	34
6. Perbandingan Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 2014	35
7. Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2015.....	36
8. Struktur Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2015.....	38
9. Struktur Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2015.....	41

Daftar Singkatan

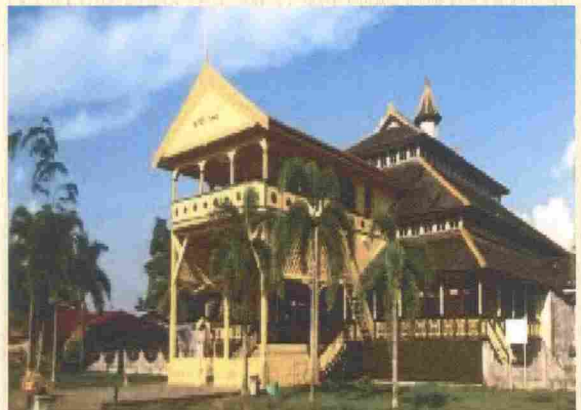
1.	ADK	Arsip Data Komputer
2.	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3.	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	ARC	Advance Release Calender / Jadwal Publikasi Kedepan
5.	BAS	Bagan Akun Standar
6.	BHMN	Badan Hukum Milik Negara
7.	BLU	Badan Layanan Umum
8.	BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
9.	BPHTB	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
10.	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
11.	BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
12.	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
13.	BUN	Bnedahara Umum Negara
14.	BUN	Bendahara Umum Negara
15.	CaLK	Catatan Laporan Keuangan
16.	COA	<i>Cart of Accounts</i>
17.	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
18.	GFS	<i>Government Finance Statistics</i>
19.	GL	General Ledger
20.	IMF	International Monetary Fund
21.	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
22.	KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
23.	LAK	Laporan Arus Kas
24.	LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
25.	LKPD-K	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
26.	LKPK-TW	Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
27.	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
28.	LKPP-TW	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
30.	LNS	Lembaga Non Struktural
31.	LO	Laporan Operasional
32.	LRA	Laporan Realisasi Anggaran
33.	LSKPD	Laporan Statistik Keuangan Daerah
34.	LSKPP-TW	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
35.	LSKP-TW	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
36.	LSKPU-TW	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah
37.	PAD	Pendapatan Asli Daerah
38.	PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
39.	PMD	Penyertaan Modal Daerah
40.	PMN	Penyertaan Modal Negara
41.	PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
42.	PPh	Pajak Penghasilan
43.	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
44.	PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
45.	SA-BL	Sistem Akuntansi Belanja Lainnya
46.	SA-BS	Sistem Akuntansi Belanja Subsidi
47.	SA-BUN	Sistem Akuntansi-Bendahara Umum Negara
48.	SAI	Sistem Akuntansi Instansi
49.	SA-IP	Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
50.	SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
51.	SAKUN	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
52.	SAL	Saldo Anggaran Lebih

53	SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
54	SAPD	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
55	SAPP	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
56	SA-PPP	Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman
57	SA-TD	Sistem Akuntansi Transfer Daerah
58	SA-TK	Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
59	Satker	Satuan Kerja
60	SAU	Sistem Akuntansi Umum
61	SA-UP&H	Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah
62	SiAP	Sistem Akuntansi Pusat
63	SiKPA	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
64	SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
65	SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara
66	SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
67	SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
68	SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
69	TP /TGR	Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
70	UAKKBUN	Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara
71	UAPPAW	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
72	UP	Uang Persediaan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kertas Kerja LKPP-TW dan LSKPP Tahun 2015 (Audited).
2. Kertas Kerja LKPD-K dan LSKPD Tahun 2015 (Audited).
3. Kertas Kerja LKPK-TW dan LSKPU Tahun 2015 (Audited).

RINGKASAN EKSEKUTIF



Istana Kadriah

Dibangun oleh Sultan Sayyid Syarif Abdulrahman Al Kadri
(Sultan pertama Kesultanan Pontianak 1771-1778 M)

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antar wilayah dan negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

GFS dihasilkan dari mapping laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, BUN dan Pemda. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi LRA Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi LKPP, (2) Konsolidasi LKPD, dan (3) Konsolidasi LKPP dengan LKPD. Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, proses konsolidasi dilakukan terhadap 15 LKPD lingkup Pemda Kalimantan Barat, 6 LK UAKBUN KPPN dan 761 Satker di Kalimantan Barat.

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, dilakukan kebijakan eliminasi akun timbal balik untuk menghindari pembukuan ganda pada saat dilakukan konsolidasi di tingkat nasional.

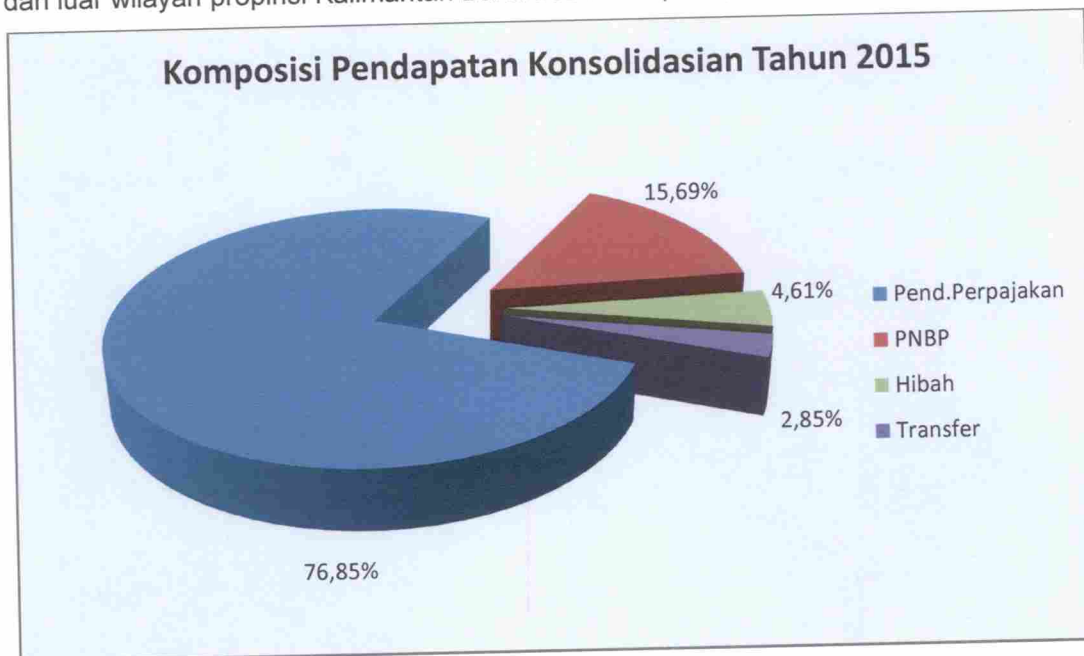
2. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tahun 2015

LRA Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Terjadi perubahan klasifikasi Penerimaan Transfer, dimana pada tahun 2014 dikelompokkan sebagai Penerimaan Hibah namun pada tahun 2015 dikelompokkan secara tersendiri sebagai salah satu unsur dari penerimaan yang ada pada LRA. Pada tahun 2015 juga dilakukan eliminasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

2.1. Laporan Realisasi Penerimaan.

Pada tahun 2015, Penerimaan Konsolidasian mencapai Rp9.367,25M, yang merupakan konsolidasi Penerimaan Pemerintah Pusat sebesar Rp5.637,35M dan Penerimaan Pemerintah Daerah konsolidasian sebesar Rp3.729,90M serta adanya eliminasi akun

resiprokal sebesar Rp16.702,55M. Terdapat tambahan Penerimaan Pemerintah Pusat dari luar wilayah propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp250,64M.

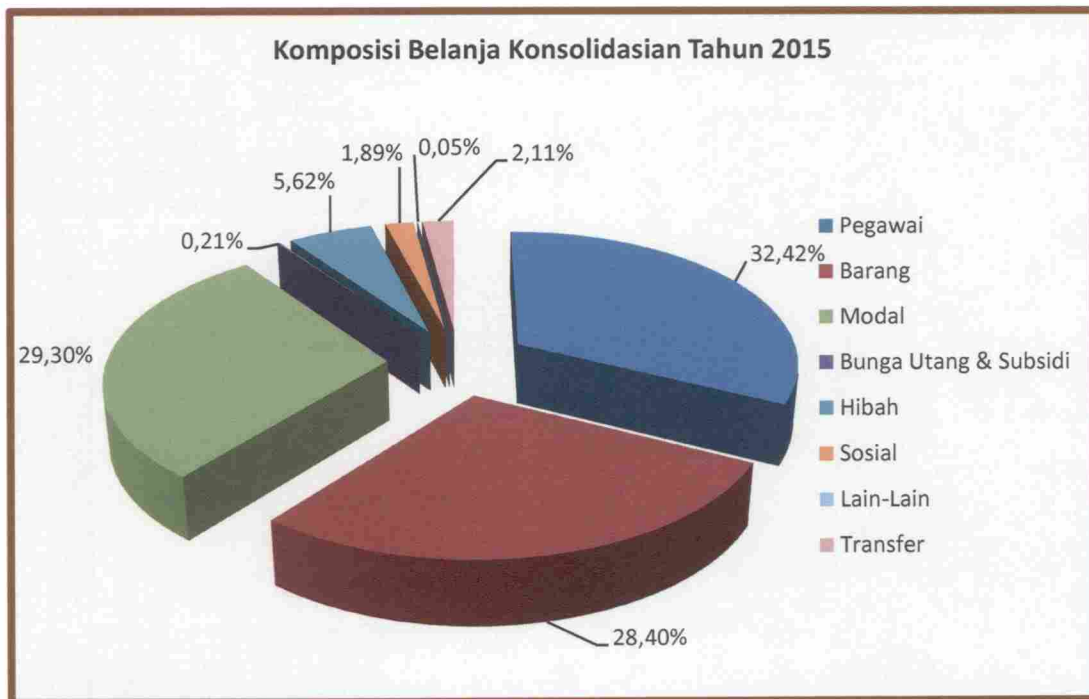


Penerimaan Konsolidasian tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp7.198,86M atau 76,85 persen, Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp1.469,55M atau 15,69 persen, Penerimaan Hibah Konsolidasian sebesar Rp431,78M atau 4,61 persen dan Penerimaan Transfer Konsolidasian sebesar Rp267,06M atau 2,85 persen.

Pada tahun 2014, Penerimaan Transfer sebesar Rp14.064,42M diklasifikasikan sebagai Penerimaan Hibah. Sedangkan pada tahun 2015, Penerimaan Transfer dikelompokkan secara tersendiri sebagai salah satu unsur dari Penerimaan yang ada pada LRA.

2.2. Laporan Realisasi Belanja

Belanja Konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp30.526,29M, merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10.343,41M dan belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp20.182,88M serta adanya eliminasi akun resiprokal sebesar Rp16.702,55M. Terdapat tambahan Belanja Pemerintah Pusat bersih dari luar wilayah propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp381,36M. Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 33,88 persen dari total Belanja Pemerintah, sedangkan sisanya 66,12 persen merupakan belanja Pemerintah Daerah.



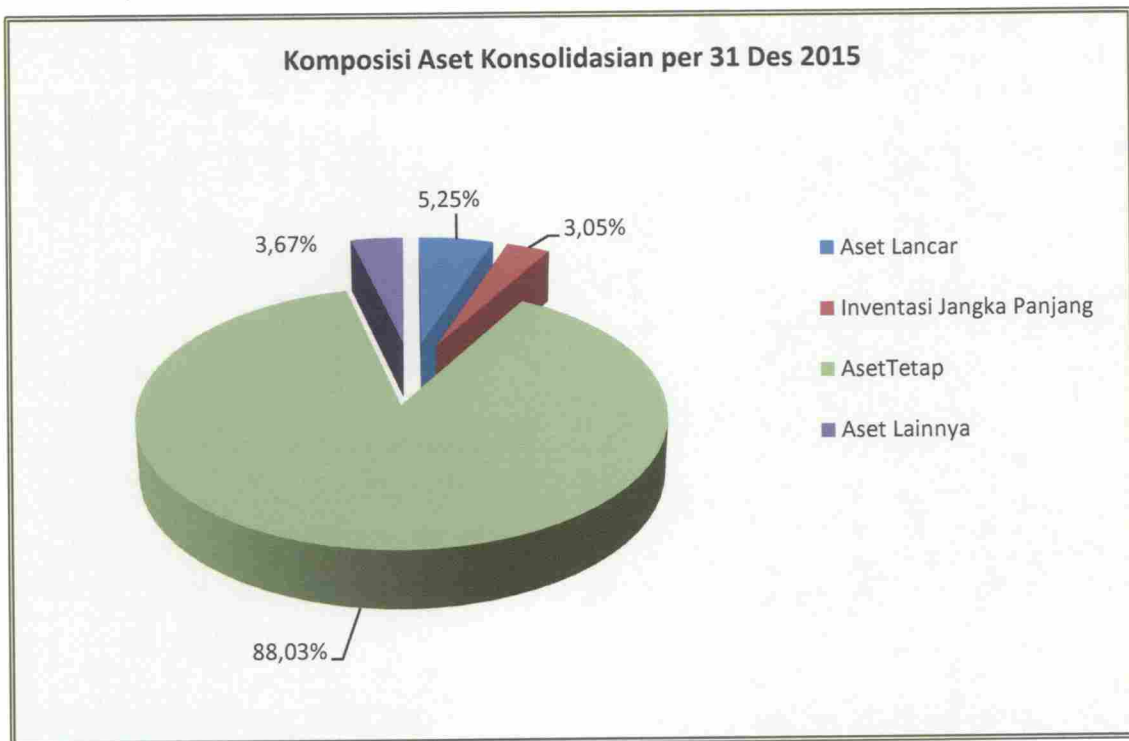
Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2015 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp9.897,13M atau 32,42 persen, Belanja Barang Konsolidasian Rp8.668,26M atau 28,40 persen, Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp8.943,60M atau 29,30 persen, Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian dan Belanja Subsidi Konsolidasian sebesar Rp63,83M atau 0,21 persen, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp1.716,50M atau 5,62 persen, Bantuan Sosial Konsolidasian Rp578,40M atau 1,89 persen, Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp15,64M atau 0,05 persen dan Belanja Transfer ke Daerah berupa Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp642,90M atau 2,11 persen.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Penyesuaian dieliminasi dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Daerah terdapat Dana Bantuan Keuangan kepada pihak ketiga sebesar Rp642,90M.

Pada tahun 2015, terdapat Defisit Konsolidasian sebesar (Rp21.159,04M), naik jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada tahun 2014 yang sebesar (Rp1.662,65M). Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit berasal dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp1.083,60M yang merupakan Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian pada Pemerintah Daerah. Total Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) Konsolidasian tahun 2015 sebesar (Rp20.075,44M).

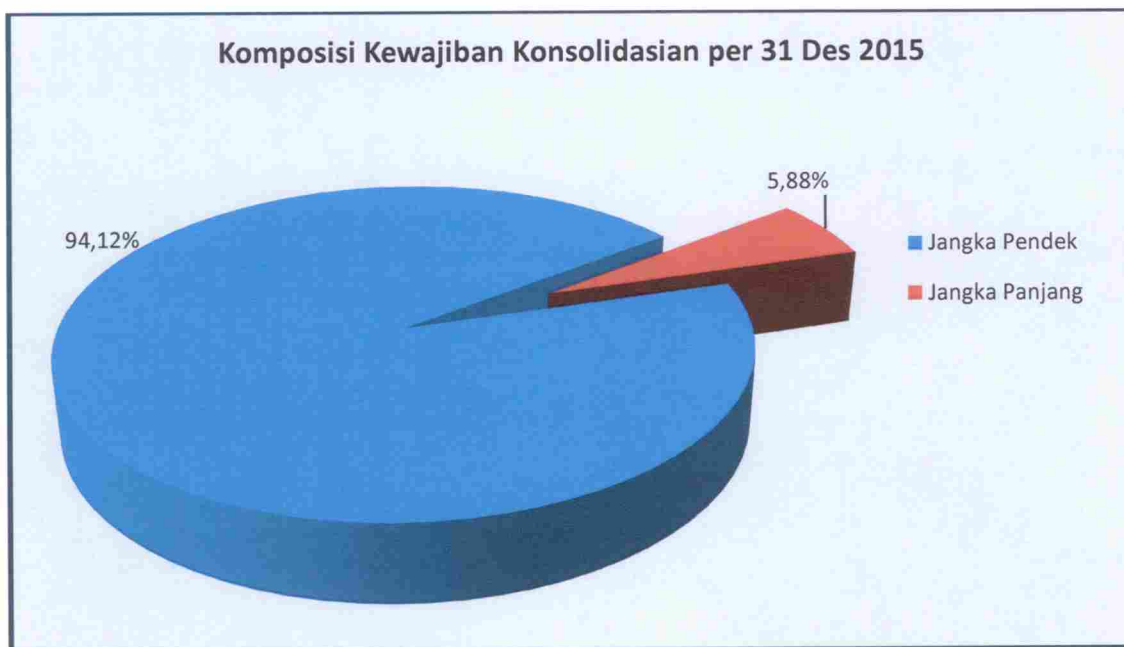
3. Neraca Konsolidasian Tahun 2015

Jumlah Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015 dicatat sebesar Rp59.647M, dalam bentuk Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp3.129,35M atau 5,25 persen, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.820,79M atau 3,05 persen, Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp52.506,07M atau 88,03 persen dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp2.190,77M atau 3,67 persen.



Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015 terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat sebesar Rp25.513,60M dan total Aset Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp34.133,39M.

Selanjutnya Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp624,47M merupakan Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp587,77M dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp36,69M.



Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2015 terdiri dari Kewajiban Pemerintah Pusat sebesar Rp123,49M dan total Kewajiban Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp500,97M.

Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp59.022,52M terdiri dari Ekuitas Konsolidasian Pemerintah Pusat sebesar Rp25.390,10M dan Ekuitas Ekuitas Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp33.632,42M.

4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2015

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini terdiri dari Laporan Operasional yang di-*mapping* menggunakan data LRA Konsolidasian, serta Neraca Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan *high level mapping*.

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2015, Pendapatan mencapai Rp9.366,72M yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp7.198,85M, Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp698,84M, dan Pendapatan Lainnya Konsolidasian sebesar Rp1.469,02M.

Beban mencapai Rp21.582,68M yang terdiri dari Beban Kompensasi Pegawai sebesar Rp9.897,13M, Beban Penggunaan Barang dan Jasa sebesar Rp6.938,25M, Beban Bunga sebesar Rp803,99M, Beban Subsidi Rp63,03M, Beban Hibah sebesar Rp4.089,41M, Beban Manfaat Sosial Rp578,40M, dan Beban Lainnya sebesar Rp15,64M.

Saldo Operasi Bruto/Neto (*Gross/Net Operating Balance*) sebesar (Rp12.215,96M) yang setelah dikurangi dengan akuisisi aset non keuangan neto sebesar Rp8.943,08M menghasilkan angka Pinjaman neto (*net lending/borrowing*) sebesar (Rp21.159,04M). Pinjaman neto tersebut ditutupi oleh akuisisi neto aset keuangan (*net acquisition of financial assets*) sebesar Rp21.183,69M dan keterjadian kewajiban neto (*net incurrence of liabilities*) sebesar Rp24,64M.

Berdasarkan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, Kekayaan Bersih per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp82.925,89M, yang terdiri Aset Non Keuangan sebesar Rp78.942,17M, Aset Keuangan sebesar Rp4.608,18M dan Kewajiban sebesar Rp624,47M.

Pontianak, 16 September 2016

Kepala Kantor,



Supendi
NIP 196702061987031002



Tari Zapin
Tarian melayu khas Kalimantan Barat

LRA KONSOLIDASIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (Audited)

URAIAN	KONSOLIDASIAN	
	TA 2015	TA 2014
A. Penerimaan		
I. Penerimaan Perpajakan		
1. Pajak Dalam Negeri	7.114.302.592.122	6.194.366.370.061
2. Pajak Perdagangan Internasional	84.555.692.925	149.242.958.379
Jumlah Penerimaan Perpajakan	7.198.858.285.047	6.343.609.328.440
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	20.415.569.161
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	137.336.256.358	0
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.269.254.484.003	1.224.413.156.903
4. Pendapatan BLU	62.957.340.411	32.677.884.352
Jumlah PNBP	1.469.548.080.772	1.277.506.610.416
III. Penerimaan Hibah	431.780.028.903	14.608.613.713.353
IV. Penerimaan Transfer	267.063.400.000	
Jumlah Penerimaan	9.367.249.794.722	22.229.729.652.209
B. Belanja Pemerintah		
1. Belanja Pegawai	9.897.137.054.803	8.898.534.992.015
2. Belanja Barang	8.668.260.316.108	5.789.846.098.333
3. Belanja Modal	8.943.605.115.918	6.091.412.158.940
4. Pembayaran Bunga Utang	803.990.883	0
5. Subsidi	63.035.759.694	7.358.650.483
6. Hibah	1.716.500.913.147	1.069.809.355.982
7. Bantuan Sosial	578.402.747.820	705.763.686.498
8. Belanja Lain-lain	15.643.124.015	1.329.662.744.239
9. Transfer Dana Bantuan Keuangan	642.904.653.662	
Jumlah Belanja dan Transfer	30.526.293.676.050	23.892.387.686.489
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(21.159.043.881.328)	(1.662.658.034.280)

URAIAN	KONSOLIDASIAN	
	TA 2015	TA 2014
D. Pembiayaan		
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.355.726.354.503	914.207.798.016
1. Penggunaan SiLPA	1.313.825.398.406	854.129.651.349
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penj. Kek. Daerah yang Dipisahkan	0	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	42.602.000.000	60.078.146.667
5. Penerimaan Kembali Piutang	233.822.800	0
6. Pen.Kemb.Inv. Non Permanen Lainnya	(934.866.703)	0
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0
8. Pen.Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	272.125.209.117	245.610.708.066
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemda	204.519.639.198	161.054.422.738
3. Pembayaran Pokok Pinjaman DN	67.250.907.086	68.573.648.028
4. Pemberian Pinjaman Daerah	354.662.833	0
5. Pengeluaran Inv.Non Permanen Lainnya	0	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	15.982.637.300
7. Pembayaran Utang Jk Panjang Lainnya	0	0
8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0
9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Pembiayaan Bersih (D.I + D.II)	1.083.601.145.386	668.597.089.950
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(20.075.442.735.942)	(994.060.944.330)

NERACA KONSOLIDASIAN



Festival Meriam Karbit
Salah satu event menarik di Pontianak
diselenggarakan pada bulan Ramadhan dan tahun baru Masehi

NERACA KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (AUDITED)

Uraian	TA 2015	TA 2014
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
Kas di Kas Negara dan Kas Daerah	1.262.632.125.503	1.118.423.068.523
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.625.881.291	11.387.797.443
Kas di Bendahara Penerimaan	1.470.663.338	3.032.390.385
Kas Lainnya dan Setara Kas	114.385.686.035	16.348.924.373
Kas pada BLU	70.797.996.381	51.207.624.698
Jumlah Kas dan Bank	1.456.912.352.548	1.200.399.805.422
Uang Muka Belanja	0	648.007.169
Investasi Jangka Pendek	4.000.000.000	447.940.248.508
Belanja dibayar di muka	12.836.062.396	0
Piutang		
Piutang Pajak	773.824.745.569	807.944.777.161
Piutang Bukan Pajak	174.481.746.548	135.281.080.035
Bagian Lancar Tag. Tuntutan Penj. Angsuran	847.598.413	775.810.396
Bagian Lancar Tag. TGR dan TP	3.734.434.924	0
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	449.167.070	0
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka	41.595.703.480	0
Piutang dari Kegiatan BLU	75.342.603.194	0
Piutang Lain-lain	231.942.871.870	151.767.184.961
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(490.518.108.154)	(292.387.977.628)
Jumlah Piutang	811.700.762.914	803.380.874.924
Persediaan	843.910.584.780	10.981.943.578
Jumlah Aset Lancar	3.129.359.762.638	2.463.350.879.601
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	2.085.013.756	2.724.567.533
Investasi Non Permanen Lainnya	29.573.610	6.403.047.256
Jumlah Investasi Non Permanen	2.114.587.366	9.127.614.789
Investasi Permanen		
Investasi Permanen PMN/D	1.714.341.560.416	1.299.912.913.613
Investasi Permanen Lainnya	104.341.938.791	16.520.258.139
Jumlah Investasi Permanen	1.818.683.499.207	1.316.433.171.752

Uraian		TA 2015	TA 2014
ASET			
Aset Tetap			
	Tanah	11.530.121.064.989	4.491.413.435.986
	Peralatan dan Mesin	7.488.168.128.609	8.876.202.369.682
	Gedung dan Bangunan	13.929.304.380.231	13.335.394.530.504
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.109.539.758.368	23.927.359.536.872
	Aset Tetap Lainnya	1.933.704.373.629	690.066.523.230
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.827.974.389.834	683.626.245.549
	Akumulasi Penyusutan	(23.312.739.691.593)	(4.608.540.799.202)
Jumlah Aset Tetap		52.506.072.404.067	47.395.521.842.621
Aset Lainnya			
	Tagihan Penjualan Angsuran	1.204.797.637	1.766.710.195
	Tagihan TP dan TGR	8.951.055.654	1.318.736.066
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	646.699.397.638	89.983.366.388
	Aset Tak Berwujud	159.119.118.147	80.889.462.552
	Aset (Dana) yang Dibatasi Penggunaannya	1.265.425.281	0
	Aset Lain-lain	1.473.638.716.342	849.547.894.491
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	(100.107.508.544)	(15.919.629.690)
Jumlah Aset Lainnya		2.190.771.002.155	1.007.586.540.002
JUMLAH ASET		59.647.001.255.433	52.192.020.048.765
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	15.754.661.940	553.102.894.035
	Utang Kepada Pihak Ketiga	58.470.465.219	2.483.686.939
	Bagian Lancar Utang J.Panjang Lainnya	0	301.979.319
	Uang Muka dari KPPN	0	1.903.266.282
	Pendapatan Diterima Dimuka	6.774.380.048	4.246.697.041
	Utang Jangka Pendek Lainnya	506.777.626.123	362.341.510.613
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		587.777.133.330	924.380.034.229
Kewajiban Jangka Panjang			
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		0
	Utang Dalam Negeri	17.666.354.370	
	Utang J. Panjang Dalam Negeri Lainnya	19.027.938.916	20.466.367.928
Jumlah Utang J. Panjang Dalam Negeri		36.694.293.286	20.466.367.928
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		36.694.293.286	20.466.367.928
JUMLAH KEWAJIBAN		624.471.426.616	944.846.402.157
EKUITAS			
	Ekuitas	59.022.529.828.817	51.247.173.646.608
Jumlah Ekuitas		59.022.529.828.817	51.247.173.646.608
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		59.647.001.255.433	52.192.020.048.765

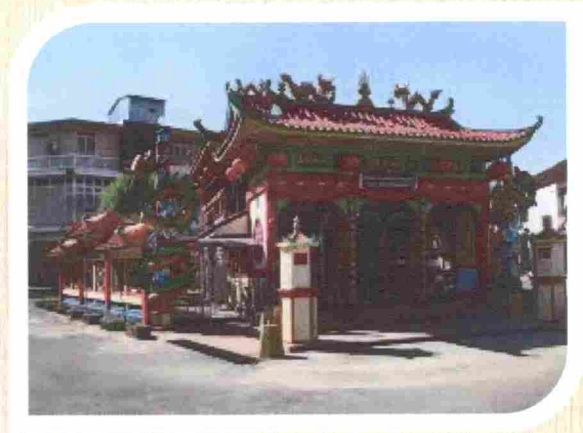


Burung Enggang/Rangkong
Hewan langka/dilindungi,
satwa endemik yang hanya ada di pulau Kalimantan

LO STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH			
Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	TA 2015	TA 2014
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	9.366.726.792.598	22.228.476.596.681
A11	Pajak	7.198.858.285.047	6.343.609.328.440
A12	Kontribusi Sosial	0	0
A13	Hibah	698.843.428.903	14.608.613.713.353
A14	Pendapatan Lainnya	1.469.025.078.647	1.276.253.554.888
A2	Beban	21.582.688.560.133	22.466.611.472.337
A21	Kompensasi Pegawai	9.897.137.054.803	8.898.534.992.015
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	6.938.253.312.059	6.150.117.503.028
A23	Konsumsi Aset Tetap	0	4.305.364.540.091
A24	Bunga	803.990.883	0
A25	Subsidi	63.035.759.694	7.358.650.483
A26	Hibah	4.089.412.570.859	1.069.809.355.982
A27	Manfaat Sosial	578.402.747.820	705.763.686.498
A28	Beban Lainnya	15.643.124.015	1.329.662.744.239
GOB	Saldo Operasi Bruto	(12.215.961.767.535)	4.067.229.664.435
NOB	Saldo Operasi Neto	(12.215.961.767.535)	(238.134.875.656)
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	8.943.082.113.793	1.424.523.158.625
A311	Aset Tetap	8.924.768.275.469	3.110.054.295.299
A312	Perubahan Persediaan	0	(360.271.404.696)
A313	Barang Berharga	0	0
A314	Aset Non Produksi	18.313.838.324	(1.325.259.731.979)
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto	(21.159.043.881.328)	(1.662.658.034.280)
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	21.183.692.788.414	1.417.047.326.214
A321	Dalam Negeri	21.183.692.788.414	1.417.047.326.214
A322	Luar Negeri	0	0
A323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0	0
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	24.648.907.086	(245.610.708.066)
A331	Dalam Negeri	24.648.907.086	(245.610.708.066)
A332	Luar Negeri	0	0
SILPA Pemerintah Pusat		(20.075.442.735.942)	(994.060.944.330)
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan		0	0



Vihara Tridarma Bumi Raya

Vihara tertua di Singkawang, berdiri sejak tahun 1878

NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

NERACA GFS			
Kode	Akun GFS	Tahun 2015	Tahun 2014
A6	KEKAYAAN BERSIH	21.646.835.491.146	17.610.253.515.915
A61	Aset Non Keuangan	21.264.824.238.144	17.095.570.924.816
A611	Aset Tetap	16.759.968.413.399	13.136.107.241.816
A6111	Gedung dan Bangunan	20.609.724.828.409	11.090.984.320.232
A6112	Mesin dan Peralatan	1.517.522.915.470	920.194.146.419
A6113	Aset Tetap Lainnya	1.332.249.530.269	1.124.928.775.165
	Akumulasi Penyusutan	(6.699.528.860.749)	0
A612	Persediaan	541.547.208.753	6.916.644.553
A613	Barang Berharga	0	0
A614	Aset Non Produksi	3.963.308.615.992	3.952.547.038.447
A6141	Tanah	3.963.308.615.992	3.952.547.038.447
A6142	Sumber Daya Energi dan Mineral	0	0
A6143	Aset yang Timbul Secara Alamiah Lainnya	0	0
A6144	Aset Non Produksi Tidak Berwujud	0	0
A62	Aset Keuangan	486.910.462.416	587.608.962.962
A6202	Uang dan Deposito	103.206.486.234	84.130.768.628
A6203	Surat Berharga Utang	0	293.804.481.481
A6208	Piutang Lainnya	383.703.976.182	209.673.712.853
A621	Dalam Negeri	486.910.462.416	587.608.962.962
A6212	Uang dan Deposito Dalam Mata Uang Domestik	103.206.486.234	84.130.768.628
A6213	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	0	293.804.481.481
A6218	Piutang Lainnya Dalam Negeri	383.703.976.182	209.673.712.853
A622	Luar Negeri	0	0
A6222	Uang dan Deposito Dalam Mata Uang Asing	0	0
A6223	Surat Berharga Utang Luar Negeri	0	0
A6228	Piutang Lainnya Luar Negeri	0	0
A63	Kewajiban	104.899.209.414	72.926.371.863
A6302	Uang dan Deposito	0	0
A6303	Surat Berharga Utang	100.079.660	0
A6304	Pinjaman	28.178.952.460	0
A6308	Utang Lainnya	76.620.177.294	72.926.371.863
A631	Domestik	104.899.209.414	72.926.371.863
A6312	Uang dan Deposito Dalam Negeri	0	0
A6313	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	100.079.660	0
A6314	Pinjaman Dalam Negeri	28.178.952.460	0
A6318	Utang Lainnya Dalam Negeri	76.620.177.294	72.926.371.863
A632	Luar Negeri	0	0
A6322	Uang dan Deposito Luar Negeri	0	0
A6323	Surat Berharga Utang Luar Negeri	0	0
A6324	Pinjaman Luar Negeri	0	0
A6328	Utang Lainnya Luar negeri	0	0

LAK STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM



Patung Naga

Salah satu ikon kota Singkawang – Kalimantan Barat

LAPORAN ARUS KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

LAPORAN ARUS KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH			
Kode	Akun GFS	Jumlah	
		TA 2015	TA 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :			
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	9.366.726.792.598	22.228.476.596.681
C11	Pajak	7.198.858.285.047	6.343.609.328.440
C12	Kontribusi Sosial	0	0
C13	Hibah	698.843.428.903	14.608.613.713.353
C14	Penerimaan Lainnya	1.469.025.078.647	1.276.253.554.888
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	21.582.688.560.133	17.800.975.527.550
C21	Kompensasi Pegawai	9.897.137.054.803	8.898.534.992.015
C22	Pembelian Barang dan Jasa	6.938.253.312.059	5.789.846.098.333
C24	Bunga	803.990.883	0
C25	Subsidi	63.035.759.694	7.358.650.483
C26	Hibah	4.089.412.570.859	1.069.809.355.982
C27	Manfaat Sosial	578.402.747.820	705.763.686.498
C28	Pembayaran Lainnya	15.643.124.015	1.329.662.744.239
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	(12.215.961.767.535)	4.427.501.069.131
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN (NFAs):			
C31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	8.943.605.115.918	5.513.255.807.790
C311.1	Aset Tetap	8.925.291.277.594	6.838.515.539.769
C312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
C313.1	Barang Berharga	0	0
C314.1	Aset Non Produksi	18.313.838.324	(1.325.259.731.979)
C31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	523.002.125	1.253.055.528
C311.2	Aset Tetap	523.002.125	1.253.055.528
C312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
C313.2	Barang Berharga	0	0
C314.2	Aset Non Produksi	0	0
C31	Keuangan	8.943.082.113.793	5.512.002.752.262
CSD	Surplus / Defisit Kas	(21.159.043.881.328)	(1.084.501.683.131)

LAPORAN ARUS KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH			
Kode	Akun GFS	Jumlah	
		2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN :			
C32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	(205.575.345.934)	(16.901.003.718.990)
C321x	Domestik	(205.575.345.934)	(16.901.003.718.990)
C322x	Luar Negeri	0	0
C323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0	0
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	(24.648.907.086)	(14.088.935.646.564)
C331	Domestik	(24.648.907.086)	(14.088.935.646.564)
C332	Luar Negeri	0	0
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan	(230.224.253.020)	(30.989.939.365.554)
NCB	Perubahan Kas Bersih	(21.389.268.134.347)	(32.074.441.048.685)



Sungai Kapuas
Sungai terpanjang di Indonesia (1.143 km)
membelah kota Pontianak

METADATA

META DATA

INFORMASI DASAR	
1. Nama Data	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
2. Penyelenggara Statistik	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat	: Jalan Karel Sasuit Tubun No.36 Pontianak
4. Nomor Telepon	: 0561-733444, 733466
5. Nomor Faksimili	: 0561-732029
6. Email	: kanwil16.djpbkalbar@gmail.com , aklap016@gmail.com
DEFINISI DATA	
<p>LKPK-TW merupakan laporan keuangan penggabungan dan eliminasi antara LKPP-TW dengan LKPD-K di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Kuasa BUN Tingkat Wilayah dan Pemda.</p> <p>LKPK-TW yang disusun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. LKPK-TW yang disusun secara akuntansi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.2. LSKPU yang terdiri dari Laporan Operasional, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah dan Laporan Arus Kas Statistik Keuangan Pemerintah.	
CAKUPAN DATA	
<p>LKPK-TW meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembar muka LRA Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian Pempus dan Pemda tingkat wilayah tahun 2015 dan perbandingan dengan tahun 2014.2. Lembar muka Laporan Operasional, Neraca dan LAK Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan <i>high level mapping</i> Tahun 2015 dan perbandingan dengan Tahun 2014.3. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang terdiri dari penjelasan per pos laporan keuangan konsolidasian dan laporan statistik keuangan pemerintah. <p>Data dinyatakan dalam Rupiah.</p>	

PERIODESASI PUBLIKASI

Triwulanan (tanpa CaLK), Semesteran (tanpa CaLK) dan Tahunan (dengan CaLK).

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Data triwulan dan semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data. Data *preliminary* tahunan diterbitkan 4 (empat) bulan setelah berakhirnya periode data (unaudited) dan 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya periode data (audited).

JADWAL PUBLIKASI KE DEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)

Satu bulan sebelum publikasi berikutnya diterbitkan.

SUMBER DATA

1. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga berupa LRA dan Neraca.
Data tersebut diperoleh dari aplikasi OM SPAN yang disediakan oleh Kantor Pusat.
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan berupa Neraca Kas Umum Negara.
Data tersebut diperoleh dari aplikasi SPAN yang disediakan oleh Kantor Pusat.
3. Pemda berupa LRA, LAK dan Neraca.
Data tersebut diperoleh dari seluruh Pemda yang ada di Kalimantan Barat, yaitu 1 (satu) Pemerintah Propinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota dan 12 (dua belas) Pemerintah Kabupaten.

METODOLOGI

LKPK-TW disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan LAK Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu :

- (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah menjadi LKPP-TW,
- (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi LKPD-K, dan
- (3) Konsolidasi LKPP-TW dengan LKPD-K menjadi LKPK-TW.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi :

- (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama,
- (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya,
- (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

LSKP, yang disusun berdasarkan pendekatan *high level mapping*, terdiri dari LO yang di-*mapping* menggunakan data LRA Konsolidasian, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, serta LAK yang di-*mapping* juga menggunakan data LRA Konsolidasian.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data audited yang telah terekonsiliasi dari 761 Satker yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari data audited yang telah terekonsiliasi dari 15 Pemda di Kalimantan Barat.
3. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya apabila kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

LKPK-TW dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Jl K.S. Tubun No 36 Pontianak. Sedangkan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.



Rumah Radakng
Rumah adat suku Dayak

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2015.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian menyatakan bahwa laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11 tersebut, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Proses penggabungan laporan ini dilakukan secara bertahap/berjenjang, dimana entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris

berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ruang lingkup laporan konsolidasi ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian meliputi tiga tahap, yaitu:

I. Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja dan Laporan Keuangan UAKBUN-D.

LKPP-TW mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa BUN dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk Satuan Kerja BLU dan Satuan Kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

LKPP-TW tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). LKPP-TW mencakup transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

LKPP-TW disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, tidak untuk tujuan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui SAPP, yang terdiri dari SA-BUN dan SAI. SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu SAK dan SIMAK-BMN. SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (DIPA), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan SA-BUN untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu SiAP, SA-

UP&H, SA-IP, SA-PPP, SA-TD, SA-BS, SA-BL, SA-TK, dan SA-BL. SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu SAKUN dan SAU. SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP, namun saat ini belum mengakomodasikan LKPP Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah disusun melalui konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Tingkat Kanwil dengan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

a. LRA Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

LRA Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan LRA Satuan Kerja yang disesuaikan dengan realisasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah terdiri dari:

- 1) Angka realisasi Pendapatan dan Hibah tingkat wilayah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan data pendapatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib setor yang berdomisili di Kalimantan Barat. Pendapatan tersebut diuji dengan penerimaan kas yang dikelola oleh Kuasa BUN di wilayah sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang riil masuk ke Kas Negara di wilayah (data SAKUN). Sedangkan data realisasi Pendapatan dan Hibah yang dilaporkan Satuan Kerja berfungsi sebagai penguji (kontrol) data Kuasa BUN.
- 2) Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan kompilasi realisasi belanja yang dilaporkan oleh Satuan Kerja yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat, di mana kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Apabila, proses rekonsiliasi antara KPPN dan satker, serta rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan dengan baik, angka yang dilaporkan oleh Satuan Kerja akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai kuasa BUN. Apabila masih terdapat angka suspen, yaitu selisih antara angka Satuan Kerja dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka angka realisasi Belanja Wilayah dapat menggunakan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh Kuasa BUN (data SAU/SAKUN). Angka tersebut berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja Satuan Kerja. Hal ini dimungkinkan karena LKPP wilayah disusun dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah, bukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pemilihan penggunaan data SAU/SAKUN untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecil.

- 3) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah tidak menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN Pusat.

b. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca tingkat Satuan Kerja dan Neraca Tingkat Kuasa BUN. Perlakuan konsolidasi atas Neraca tingkat Satuan Kerja dan Neraca Tingkat Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dan Bank meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU.
- 2) Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN sedangkan Angka Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU diambil dari Neraca Tingkat Satuan Kerja. Rekening Kas di KPPN, Kas di Bendaharan Pengeluaran, Kas dan Kas Lainnya yang telah disahkan ke KPPN dan Kas pada BLU yang telah disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA (Ekuitas).
- 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA (Ekuitas).
- 4) Utang kepada Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Satuan Kerja, disajikan dengan akun pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
- 5) Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Ekuitas.
- 6) Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Ekuitas.
- 7) Kas pada BLU yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Ekuitas.
- 8) Piutang, Investasi Jangka Pendek, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta akun pasangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam jurnal standar, didasarkan pada Neraca Satuan Kerja.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA , Neraca Pemerintah Pusat serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam LKPP TW Tahun 2015, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (K/L) yang dikonsolidasi meliputi 761 LK Satker di Provinsi Kalimantan Barat.

II. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi (LKPD-K)

LKPD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan Catatan atas LKPD Konsolidasian.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Sumber data dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah tersebut antara lain:

a) Konversi LKPD

Berdasarkan data yang dihimpun, laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam dua format, yaitu format sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan format sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan perbedaan format tersebut, dalam rangka proses konsolidasi dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan menyesuaikan LKPD yang disusun dengan Permendagri 13/2006 menjadi format sesuai SAP dengan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 3 tahun 2005 yang diterbitkan oleh KSAP.

b) Konsolidasi pada tingkat provinsi

Proses konsolidasi tingkat wilayah dilakukan dengan menjumlahkan hasil konsolidasi pada tingkat kabupaten/kota. Proses konsolidasi dilakukan antara LKPD provinsi dengan LKPD kabupaten/kota.

Konsolidasi LKPD dilakukan terhadap 1 (satu) LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2 (dua) LKPD Pemerintah Kota dan 12 (dua belas) LKPD Pemerintah Kabupaten.

III. Konsolidasi LKPP-TW dengan LKPD-K

Penyusunan Laporan keuangan konsolidasi LKPP-TW dengan LKPD-K merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri

Kuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen PBN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Konsolidasian ini dapat dilihat peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pendekatan penyusunan LRA Konsolidasian ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas per wilayah yang merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dari sektor pemerintahan.

Kebutuhan penyusunan LKPK-TW dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antar wilayah negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir I.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan LKPK-TW juga dilakukan dalam rangka menjawab laporan hasil rewiu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010, yang mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik.

Menurut hasil rewiu tersebut, secara umum, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

LKPP-TW merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Konsolidasi LKPP dan LKPD tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan

dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2015 mencakup:

a) LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah

Angka yang dikonsolidasikan dalam LRA Konsolidasian ini adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka APBN maupun APBD. Dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi ini, realisasi per jenis belanja Pemerintah Pusat disajikan berdasarkan data BUN (SAU/SAKUN) sehingga tidak disajikan angka suspen belanja.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun LRA Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan. Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada LRA Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi.
- Eliminasi pendapatan transfer pada LKPD Kabupaten dan kota dengan belanja transfer pada LKPD Provinsi. Belanja transfer dari provinsi berasal dari PAD provinsi. Pos tersebut pada umumnya berupa bagi hasil dan bantuan keuangan.
- Belanja transfer dari kabupaten ke desa tetap disajikan karena tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan.

b) Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Konsolidasi Neraca Pemerintah dilakukan terhadap Neraca 761 Satker kementerian negara/lembaga, Neraca 6 KPPN dan Neraca 15 Pemda yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan. Secara umum, aset dan kewajiban Pempus dan Pemda merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pempus dapat dijumlahkan dengan akun aset Pemda, dan akun kewajiban Pempus dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban Pemda kecuali untuk akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pempus dan Pemda yang harus dieliminasi.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi. Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca Konsolidasian, yang berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pempus

dan Pemda, yaitu akun utang-piutang antara kedua entitas tersebut.

c) LAK Konsolidasian Tingkat Wilayah

LAK Tingkat Wilayah disusun berdasarkan mapping data dari LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah. Hal ini dilakukan mengingat LAK dari LKPP TW berasal dari LAK UAKKBUN yang menggunakan SPAN, dimana LAK yang dihasilkan hanya berdasarkan kas yang diterima atau dikeluarkan dari rekening Pempus yang berada di daerah. Hal tersebut kurang menggambarkan kondisi kas yang sebenarnya terjadi di daerah mengingat sebagian besar kas diterima dan dikeluarkan langsung dari Rekening Pempus yang berada di Pusat.

d) Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Analisis dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan dengan pendekatan:

- Analisis belanja dilakukan dengan:
 - 1) Merinci belanja Pempus per jenis belanja. Data belanja Pempus diambil dari sistem akuntansi pemerintah pusat.
 - 2) Realisasi belanja per jenis belanja untuk Pemda diambil dari LKPD, dan
 - 3) Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per jenis belanja.
- Analisis per jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas serta akun per tahun dan antar tahun.

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK

LRA Konsolidasian Pempus dan Pemda Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP- TW telah mengacu pada SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian LKPD Konsolidasian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah mengacu pada SAP melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP-TW dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

1. Pendapatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2. Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan dan CaLK menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

3. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

4. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5. Ekuitas.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Penerapan akrual hanya menganut satu jenis Ekuitas, berbeda dengan tahun 2014 yang masih berbasis CTA yang menganut 3 (tiga) jenis Ekuitas, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

6. Bagan Akun Standar.

Pos-pos yang disajikan pada LRA adalah berdasarkan BAS yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 214/PMK.05/2014. Pos-pos yang disajikan pada LRA APBD adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.

Kebijakan eliminasi akun timbal balik yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah:

a) Eliminasi Akun Timbal Balik.

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antar Pempus dan Pemda. Eliminasi akun timbal balik dilakukan dengan jumlah yang sama pada LRA Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian.

b) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya.

Akun timbal balik dengan jumlah yang tidak sama dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan mengeliminasi akun timbal balik berdasarkan jumlah masing-masing. Contoh eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya adalah akun Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil pada RA Konsolidasian Pemda dengan Belanja Transfer Dana Bagi Hasil pada LRA Pempus.

c) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

Pada konsolidasi laporan keuangan Pemda terdapat beberapa akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan angka akun timbal balik, tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan, dan tidak ditemukan akun timbal balik dari akun yang seharusnya dieliminasi. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang

belum tersedia dan mempertimbangkan manfaat penyajian akun tersebut pada laporan keuangan konsolidasi, maka eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya dilakukan dengan mengeliminasi akun tersebut sebesar jumlahnya. Contoh akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya yaitu Bagian Lancar Utang ke Pemda Lainnya dan Utang Dalam Negeri ke Pemda Lainnya pada Neraca Konsolidasian Pemda.

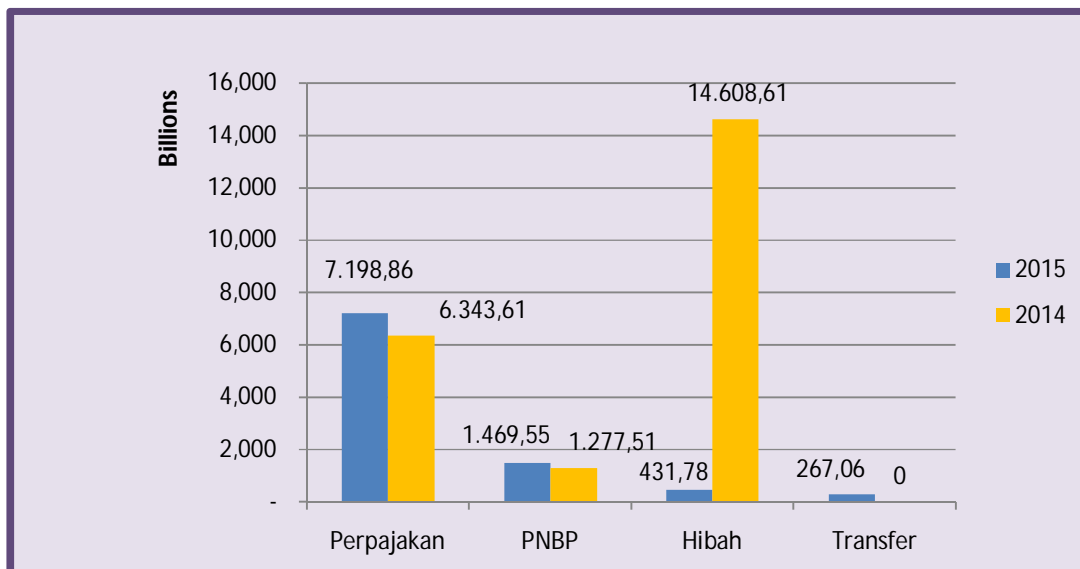
B. CATATAN ATAS LRA TINGKAT WILAYAH

B.1. PENJELASAN ATAS POS PENERIMAAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2015, Penerimaan Konsolidasian Tingkat Wilayah mencapai Rp9.367.249.794.722 yang merupakan konsolidasi Penerimaan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp5.637.352.256.738 dan konsolidasi Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar Rp3.729.897.537.985. Terdapat tambahan Penerimaan Pemerintah Pusat bersih dari luar wilayah propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp250.641.676, dimana Rp548.444.640 merupakan tambahan penerimaan yang masuk sedangkan yang keluar dari sebesar Rp297.802.964.

Penerimaan Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Penerimaan Perpajakan, konsolidasi Penerimaan Bukan Pajak, dan konsolidasi Penerimaan Hibah, sedangkan Penerimaan transfer pemerintah daerah yang berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dieliminasi dengan belanja transfer pemerintah pusat.

Penerimaan Perpajakan Konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp7.198.858.285.047 terdiri dari konsolidasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp7.114.302.592.122 dan konsolidasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp84.555.692.925. Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp1.469.648.080.772 terdiri atas Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/BUMD sebesar Rp137.336.256.358, Penerimaan PNPB Lainnya sebesar Rp1.269.254.484.003 dan Penerimaan BLU sebesar Rp62.957.340.411. Penerimaan Hibah tahun 2015 adalah sebesar Rp431.780.028.903 berasal dari Pemerintah daerah saja. Adapun Penerimaan Transfer berupa Bantuan Keuangan tahun 2015 adalah sebesar Rp4.267.063.400.000 juga berasal dari Pemerintah Daerah saja.



Grafik 1. Perbandingan Penerimaan Konsolidasian Tahun 2015 dan 2014

Pajak Dalam Negeri Konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp7.114.302.592.122 terdiri dari Pajak Dalam Negeri Pemerintah Pusat sebesar Rp5.142.573.153 dan Pajak Pemerintah Daerah sebesar Rp1.971.729.439.039. Hal ini berarti Pajak Dalam Negeri Konsolidasian tahun 2015 lebih besar Rp919.936.222.601 atau naik 14,85 persen dibandingkan dengan Pajak Dalam Negeri Konsolidasian tahun 2014 sebesar Rp6.194.366.370.061.

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Konsolidasian tahun 2015 seluruhnya merupakan Penerimaan Pemerintah Pusat sebesar Rp84.555.692.925 lebih kecil Rp64.687.265.454 atau menurun 43,34 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp149.242.958.379.

Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp1.469.548.080.772 terdiri dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D sebesar Rp137.336.256.358 Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.269.254.484.003 dan Penerimaan dari BLU/D sebesar Rp62.957.340.411.

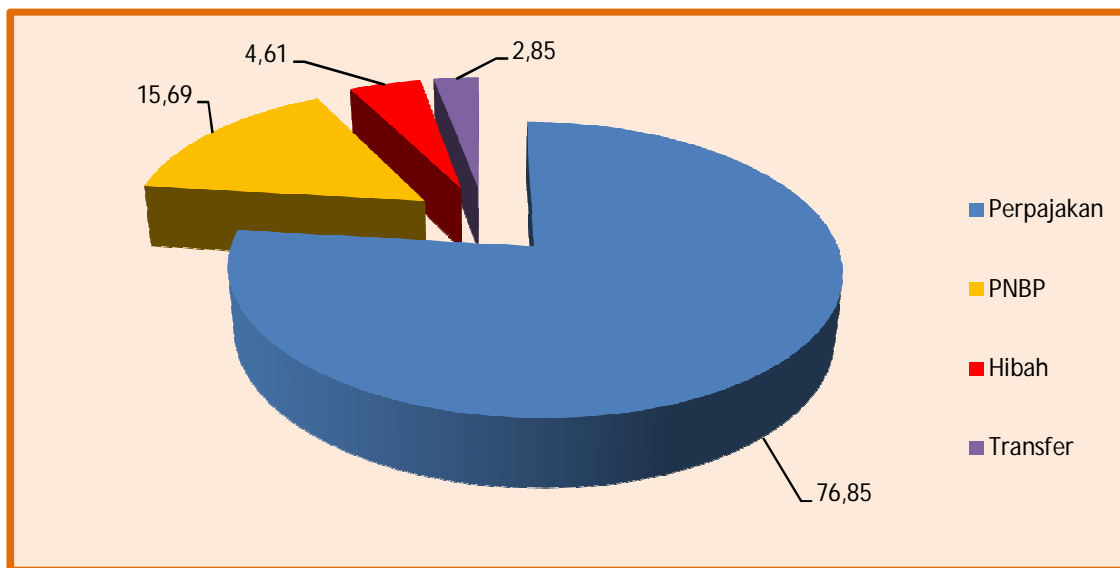
Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp410.223.41.730 dan Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp1.059.324.670.042.

Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2015 lebih besar Rp192.041.470.356 atau naik 15,03 persen dibandingkan dengan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2014 sebesar Rp1.277.506.610.416.

Pada tahun 2015, Penerimaan Hibah Konsolidasian mencapai Rp431.780.028.903 seluruhnya berasal dari Penerimaan Hibah Pemerintah Daerah. Penerimaan Hibah Konsolidasian tahun 2015 lebih kecil Rp14.176.833.684.450 atau turun 97,04 persen dibandingkan dengan Penerimaan Hibah Konsolidasian tahun 2014 sebesar Rp14.608.613.353. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014, Penerimaan Transfer sebesar Rp14.064.423.550.088 diklasifikasikan sebagai Penerimaan Hibah. Sedangkan pada tahun 2015, Penerimaan Transfer dikelompokkan secara tersendiri sebagai salah satu unsur dari Penerimaan yang ada pada LRA.

Pada tahun 2015, Penerimaan Transfer Konsolidasian mencapai Rp267.063.400.000 seluruhnya berasal dari Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat. Penerimaan Transfer Konsolidasian tahun 2014 tidak ada, hal ini disebabkan karena Penerimaan Transfer diklasifikasikan sebagai Penerimaan Hibah.

Penerimaan Konsolidasian tahun 2015 didominasi oleh Penerimaan Perpajakan Konsolidasian sebesar 76,85 persen, yang diikuti dengan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 15,69 persen, Penerimaan Hibah Konsolidasian sebesar 4,61 persen dan Penerimaan Transfer Konsolidasian sebesar 2,85 persen.



Grafik 2. Komposisi Penerimaan Konsolidasian Tahun 2015

Komposisi Penerimaan Pajak Konsolidasian didominasi oleh Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp7.114.302.592.122 atau 98,82 persen, diikuti Penerimaan Pajak Luar Negeri sebesar Rp84.555.692.925 atau 1,18 persen.

Pajak merupakan Penerimaan yang dominan dalam struktur Penerimaan dan Hibah. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan dan langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan terkait dengan perubahan paket perundang-undangan dan tata kelola institusi perpajakan. Walaupun pemerintah juga mengupayakan peningkatan Penerimaan Bukan Pajak, pemerintah juga terus menjaga kesinambungan Penerimaan Perpajakan dalam struktur Penerimaan negara.

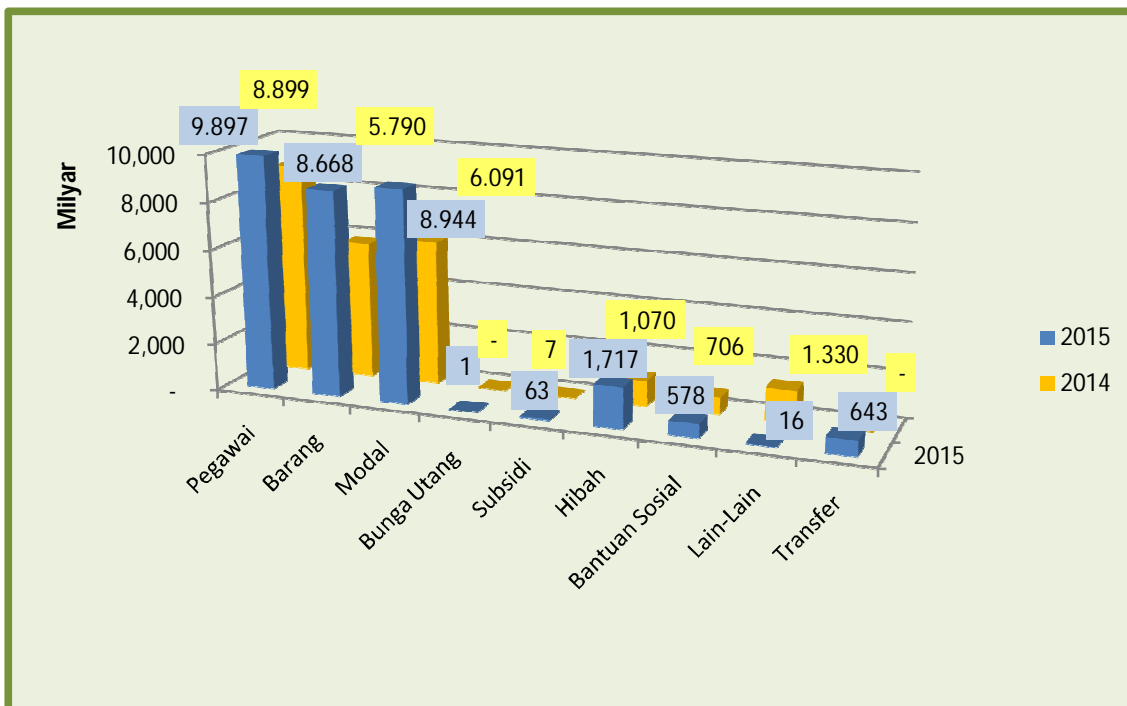
Komposisi Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian didominasi oleh Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sebesar 86,37 persen, diikuti Bagian Atas Laba BUMN/D sebesar 9,35 persen dan Penerimaan BLU sebesar 4,28 persen.

B.2. PENJELASAN ATAS POS BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian tahun 2015 sebesar Rp30.526.293.676.050 terdiri dari konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10.343.410.286.391 dan belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp20.182.883.389.660. Terdapat tambahan Belanja Pemerintah Pusat dari luar wilayah provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp381.367.148.842, sedangkan belanja yang keluar dari Kalimantan Barat tidak ada. Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 33,88 persen dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Belanja Pemerintah Daerah berkontribusi sebesar 66,12 persen.

Belanja Konsolidasian tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp6.633.905.989.561 atau sebesar 27,77 persen dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian 2014, yang sebesar Rp23.892.387.686.489.

Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2015 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp9.897.137.054.803, Belanja Barang Konsolidasian sebesar Rp8.668.260.316.108, Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp8.943.605.115.918, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian sebesar Rp803.990.883, Belanja Subsidi Konsolidasian sebesar Rp63.035.759.694, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp1.716.500.913.147, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp578.402.747.820, Belanja Lain-Lain sebesar Rp15.643.124.015 dan Transfer Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp642.904.653.662.



Grafik 3. Perbandingan Belanja Konsolidasian per Jenis Belanja Tahun 2015 dan 2014

Belanja Pegawai Konsolidasian tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp998.602.062.78 atau 11,22 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Konsolidasian tahun 2014 sebesar Rp8.898.534.992.015, Belanja Barang Konsolidasian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp2.878.414.217.775 atau 49,71 persen jika dibandingkan dengan Belanja Barang Konsolidasian tahun 2014 sebesar Rp5.789.846.098.333, Belanja Modal Konsolidasian tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp2.852.192.956.978 atau 46,82 persen jika dibandingkan dengan Belanja Modal Konsolidasian tahun 2014 sebesar Rp6.091.412.158.940.

Dari perspektif struktur realisasi belanja, terlihat bahwa realisasi belanja pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini diukur dari rasio realisasi belanja modal dan barang terhadap belanja pegawai, dimana semakin besar persentase belanja modal dan barang menunjukkan bahwa struktur belanja semakin sehat karena belanja tersebut merupakan salah satu elemen penting untuk menggerakkan roda perekonomian yang memberikan nilai tambah di masa sekarang dan masa mendatang.

Alokasi kewajiban Pembayaran Bunga Utang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban Pembayaran Bunga Utang secara tepat waktu serta pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana agar beban pembayaran bunga cicilan pokok utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi.

Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian tahun 2015 senilai Rp803.990.883 sedangkan pada tahun 2014 nihil.

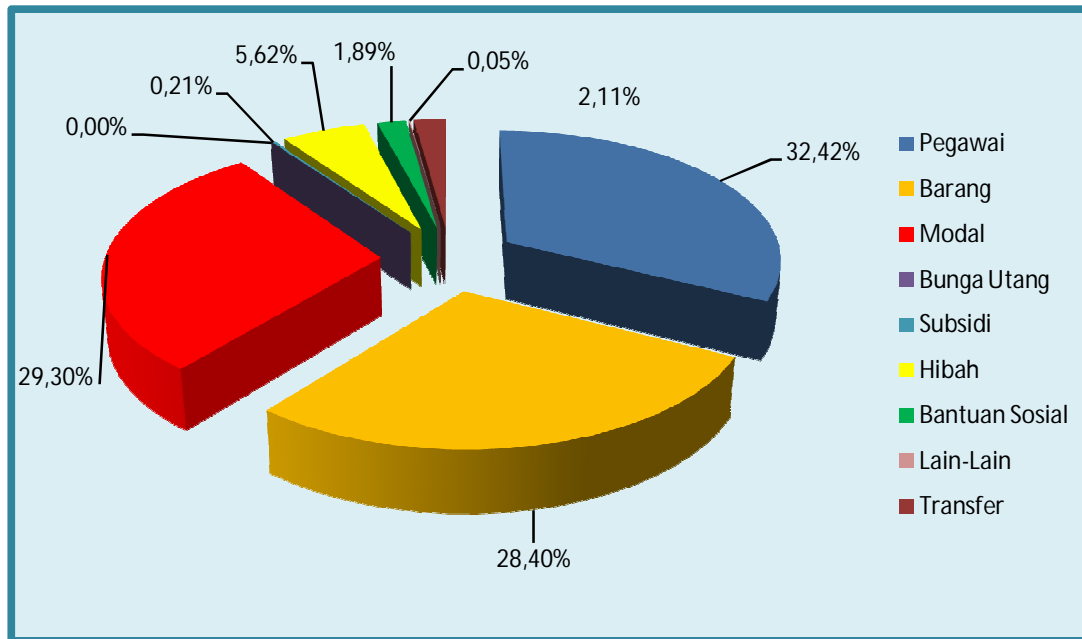
APBN/APBD sebagai piranti kebijakan Pemerintah yakni memiliki fungsi stabilisasi antara lain digunakan untuk penyediaan berbagai jenis subsidi baik berupa subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (*price subsidies*), maupun subsidi ke objek sasaran (*targeted subsidies*).

Belanja Subsidi Konsolidasian tahun 2015 senilai Rp63.035.759.694 mengalami kenaikan sebesar Rp55.677.109.211 atau 756,62 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp7.358.650.483. Belanja Subsidi ini seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah. Belanja Hibah Konsolidasian tahun 2015 senilai Rp1.716.500.913.147 mengalami kenaikan sebesar Rp646.691.557.165 atau 60,45 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp1.069.809.355.982, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian tahun 2015 senilai Rp578.402.747.820 mengalami penurunan sebesar Rp127.360.938.678 atau 18,05 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp705.763.686.498, Belanja Lain-Lain Konsolidasian tahun 2015 senilai Rp15.643.124.015 mengalami penurunan sebesar Rp1.314.019.620.224 atau 98,82 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp1.329.662.744.239. Belanja Lain-Lain tahun 2014 termasuk Transfer Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp603.036.162.824.

Transfer Dana Bantuan Keuangan Konsolidasian tahun 2015 senilai Rp642.904.653.662 sedangkan tahun 2014 dikategorikan sebagai Belanja Lain-lain.

Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi anggaran (jenis belanja) pada tahun 2015 didominasi oleh Belanja Pegawai Konsolidasian mencapai 32,42 persen. Di urutan kedua adalah Belanja Modal Konsolidasian sebesar 29,30 persen, dan selanjutnya diikuti oleh Belanja Barang sebesar 28,40 persen, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar 5,62 persen, Transfer Konsolidasian sebesar 2,11 persen, Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 1,89 persen, Belanja Belanja Subsidi Konsolidasian

sebesar 0,21 persen, Belanja Lain-Lain Konsolidasian sebesar 0,05 persen dan Belanja Pembayaran Bunga Konsolidasian nilainya mendekati 0,00 persen.



Grafik 4. Komposisi Belanja Konsolidasian berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

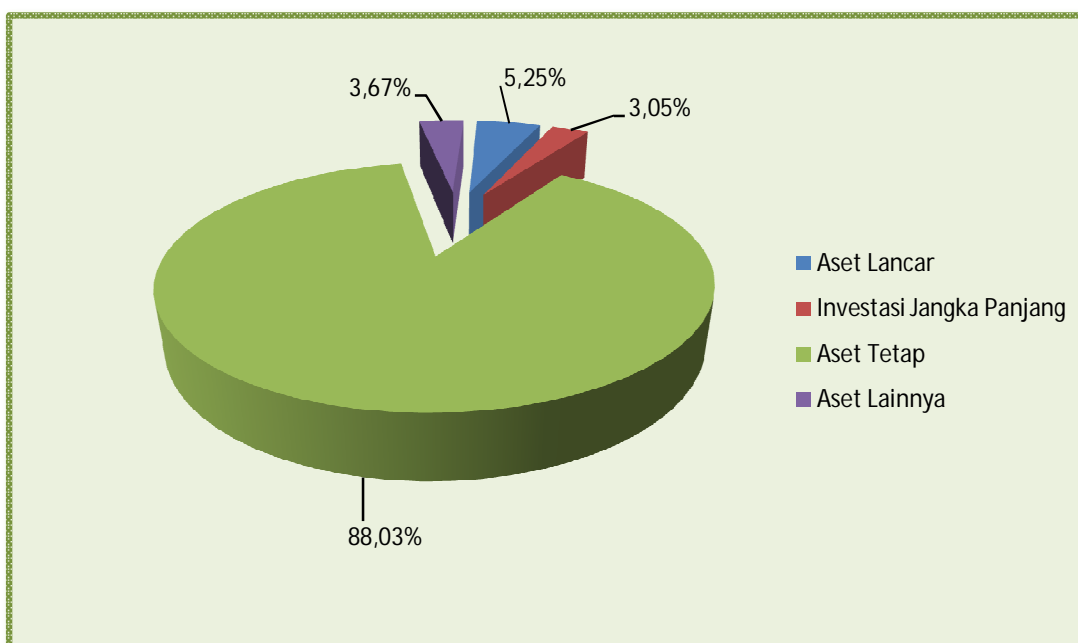
Belanja Modal merupakan komponen terbesar kedua Belanja Pemerintah Konsolidasian dilihat dari klasifikasi ekonomi. Hal tersebut menunjukkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kalimantan Barat cukup serius untuk memperbaiki infrastruktur yang memang masih menjadi titik kelemahan dalam pembangunan di wilayah Kalimantan Barat. Belanja modal juga merupakan salah satu komponen terbesar belanja pemerintah. Belanja modal secara langsung mempengaruhi tumbuhnya perekonomian melalui meningkatnya nilai investasi. Alokasi anggaran yang antara lain bertujuan untuk menambah atau memperoleh aset ini dialokasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah antara lain terkait dengan infrastruktur pembangunan irigasi, revitalisasi pembangunan listrik dan jaringan dan sebagainya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 31 DESEMBER 2015

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp59.647.001.255.433, sama dengan penjumlahan Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp624.471.426.616 dan Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp59.022.529.828.817.

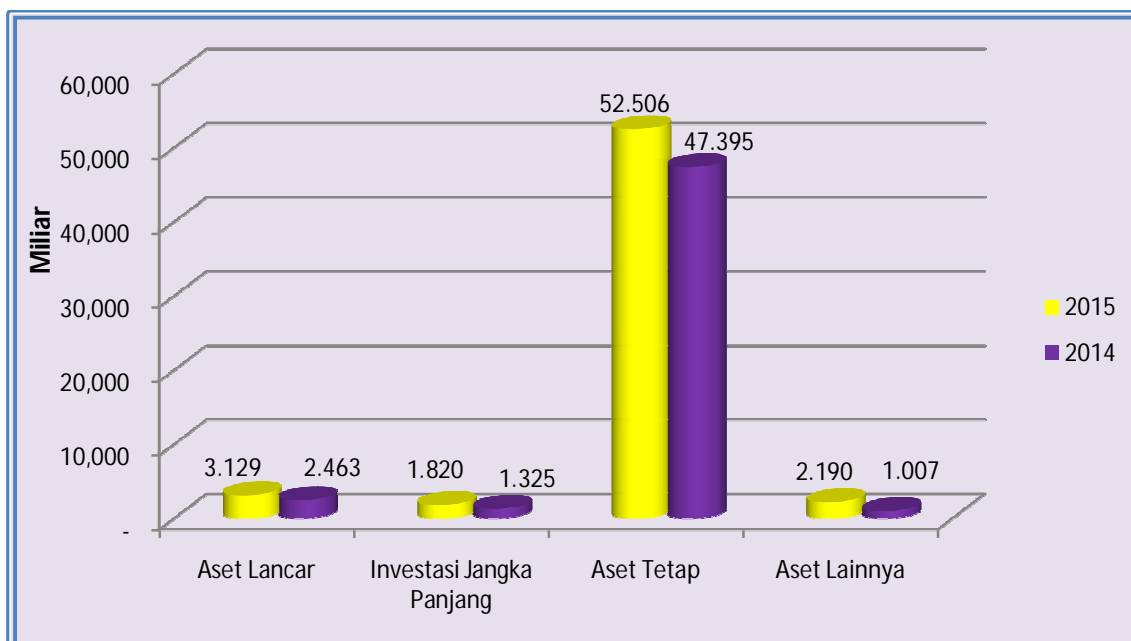
C.1. ASET KONSOLIDASIAN

Aset Konsolidasian terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian, Aset Tetap Konsolidasian dan Aset Lainnya Konsolidasian. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp59.647.001.255.433.



Grafik 5. Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian yaitu 88,03 persen dari Total Aset Konsolidasian, disusul oleh Aset Lancar Konsolidasian 5,25 persen, Aset Lainnya Konsolidasian 3,67 persen dan Investasi Jangka Panjang Konsolidasian 3,05 persen. Perbandingan perubahan struktur Aset Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

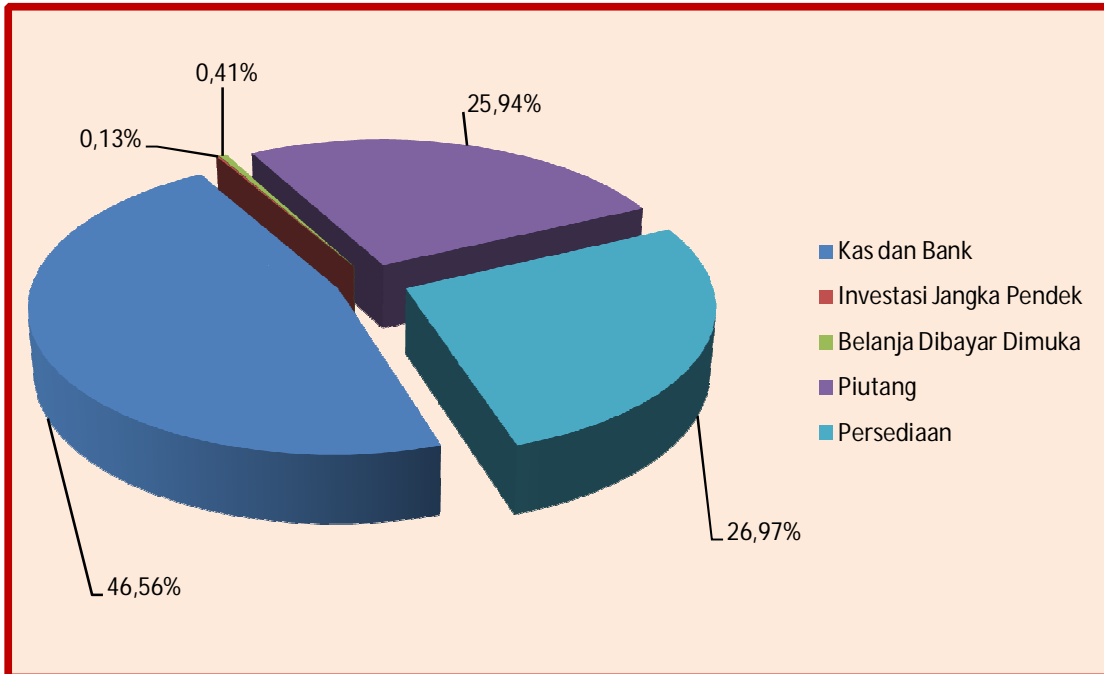


Grafik 6. Perbandingan Aset Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 2014

1. Aset Lancar Konsolidasian

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari antara lain Kas di KPPN dan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas pada BLU, Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Investasi Jangka Pendek, dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.129.359.762.638, yang terdiri atas Kas dan Bank Konsolidasian sebesar Rp1.456.912.352.548, Investasi Jangka Pendek sebesar Rp3.446.688.519, Belanja Dibayar Dimuka Konsolidasian sebesar Rp12.836.062.396, Piutang Konsolidasian sebesar Rp811.700.762.914 dan Persediaan Konsolidasian sebesar Rp843.910.584.780. Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp666.008.883.037 atau 27,04 persen dari Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.463.350.879.601.



Grafik 7. Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2015

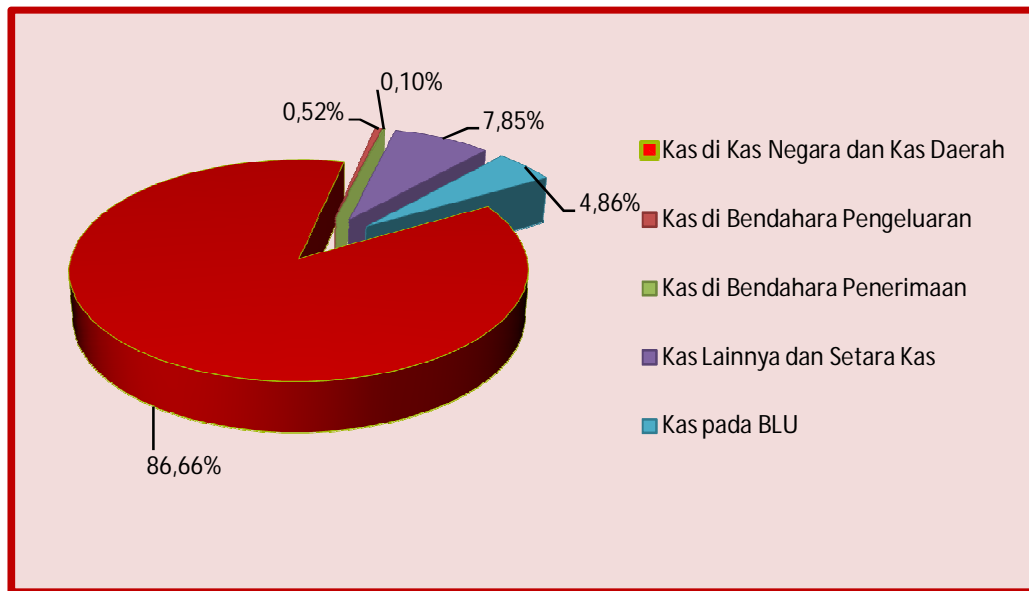
1.1. Kas dan Bank Konsolidasian

Kas dan Bank Konsolidasian sebesar Rp1.456.912.352.548 terdiri dari:

- a. Rekening Kas di KPPN dan Kas Daerah Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.262.632.125.503, merupakan penggabungan Rekening Kas di KPPN pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp2.547.258.477 dan Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.260.084.867.026. Kas di KPPN dan Kas Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.118.423.068.523, merupakan penggabungan Rekening Kas di KPPN pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp11.431.998.563 dan Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.106.991.069.960. Rekening Kas di KPPN dan Kas Daerah per 31 Desember 2015 meningkat sebesar 12,89 persen atau Rp144.209.056.980 dari jumlah Rekening Kas di KPPN dan Kas Daerah per 31 Desember 2014.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP, namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.625.881.291 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp1.289.059.281 dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar

Rp6.336.822.010. Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.387.797.443, terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp1.903.266.282 dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp9.484.531.161. Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2015 menurun 33,03 persen atau Rp3.761.916.152 dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014.

- c. Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.470.663.338, terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp137.625.318 dan Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp1.333.038.020. Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp1.561.727.047 atau 51,50 persen dibandingkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.032.390.385.
- d. Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp114.385.686.035 merupakan kas yang berada di Bendahara Pengeluaran selain Uang Persediaan yang terdiri dari Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp59.987.349.275 dan Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp54.398.336.760. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp16.348.924.373. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp98.036.761.662 atau 599,65 persen dari Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dana lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan lainnya.
- e. Kas pada BLU/D Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp70.797.996.381 terdiri dari Kas pada BLU pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp25.690.813.681 dan Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp45.107.182.700. Kas pada BLU/D Konsolidasian per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp19.590.371.683 atau 38,26 persen dari Kas pada BLU/D Konsolidasian per 31 Desember 2014 sebesar Rp51.207.624.698.



Grafik 8. Struktur Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2015

1.2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.000.000.000 merupakan Investasi Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Pusat. Investasi Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp443.940.248.508 atau 99,11 persen dibandingkan dengan Investasi Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp447.940.248.508.

1.3. Beban Dibayar Dimuka Konsolidasian

Beban Dibayar Dimuka Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp12.836.062.396 yang merupakan Beban Dibayar Dimuka pada Neraca Pemerintah Pusat. Tidak terdapat saldo Beban Dibayar Dimuka Konsolidasian per 31 Desember 2014.

1.4. Uang Muka Belanja Konsolidasian

Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.

1.5. Piutang Konsolidasian

Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp811.700.762.914 mengalami peningkatan sebesar Rp8.319.887.990 atau 1,04 persen dibandingkan

dengan Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp803.380.874.924. Rincian dari Piutang Konsolidasian adalah sbb :

- a. Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp773.824.745.569 merupakan penggabungan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp596.685.910.537 dan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp177.138.835.032. Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp34.120.031.592 atau 4,22 persen dibandingkan dengan Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp807.944.777.161.
- b. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp174.481.746.548 merupakan penggabungan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp76.975.448.303 dan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp97.506.298.245. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp39.200.666.513 atau 28,98 persen dibandingkan dengan Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp135.281.080.035.
- c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp847.598.413 yang merupakan penggabungan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp60.000.000 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp787.598.413. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp71.788.017 atau 9,25 persen dibandingkan dengan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2014 sebesar Rp775.810.396.
- d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.734.434.924 yang merupakan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan pada Neraca Pemerintah Daerah.
- e. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp449.167.070 yang merupakan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Daerah.
- f. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp41.595.703.480 yang merupakan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah.

- g. Piutang dari Kegiatan BLU Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp75.342.603.194 yang merupakan Piutang dari Kegiatan BLU pada Neraca Pemerintah Daerah.
- h. Piutang Lain-Lain Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp231.942.871.870 merupakan Piutang Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Daerah. Piutang Lain-Lain Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp80.175.686.910 atau 52,83 persen dibandingkan dengan Piutang Lain-Lain Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp151.767.184.961.
- i. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah (Rp490.518.018.154).

1.6. Persediaan Konsolidasian

Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp843.910.584.780 merupakan penggabungan Persediaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp401.954.984.245 dan Persediaan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp441.955.600.535. Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp832.928.641.202 atau 7.584,53 persen jika dibandingkan dengan Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2014 yakni sebesar Rp10.981.943.578.

2. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp1.820.798.086.573 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp2.114.587.366 dan Investasi Permanen sebesar Rp1.818.683.499.207.

Investasi Non Permanen Konsolidasian terdiri dari Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Bergulir Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah Rp2.085.013.756 yang merupakan Dana Bergulir pada Neraca Pemerintah Daerah, yang merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L.

- b. Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D) Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp29.573.610 dan Rp6.403.047.256 yang merupakan Investasi Non Permanen Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah.

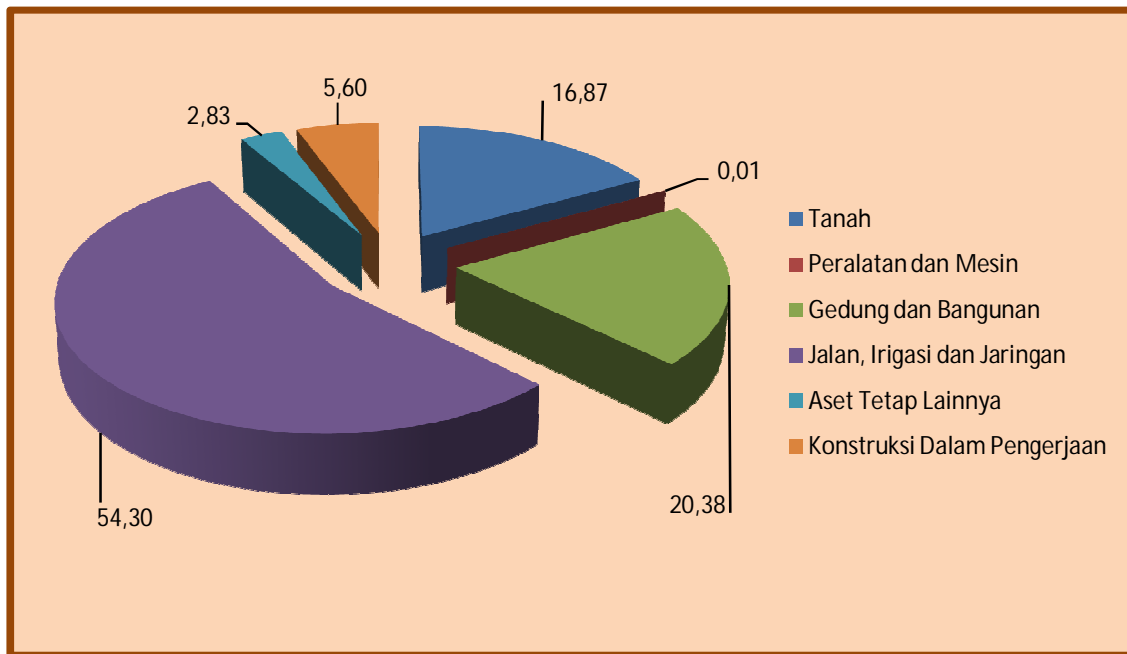
Investasi Permanen Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.818.683.499.207 yang seluruhnya merupakan Investasi Permanen pada Neraca Pemerintah Daerah. Investasi Permanen Konsolidasian per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp502.250.327.455 atau 38,15 persen jika dibandingkan dengan Investasi Permanen Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang sebesar Rp1.316.433.171.752. Investasi Permanen Konsolidasian terdiri dari :

- a. Investasi Permanen PMN/D Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah Rp1.714.341.560.416 yang merupakan Investasi Permanen PMN/D pada Neraca Pemerintah Daerah. Investasi Permanen PMN/D Konsolidasian per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp414.428.646.803 atau 31,88 persen jika dibandingkan dengan Investasi Permanen PMN/D Konsolidasian per 31 Desember 2014 yakni sebesar Rp1.299.912.913.613.
- b. Investasi Permanen BLU Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.
- c. Investasi Permanen Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah Rp29.573.610 yang merupakan Investasi Permanen Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah. Investasi Permanen Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.373.473.646 atau 99,54 persen jika dibandingkan dengan Investasi Permanen Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2014 yakni sebesar Rp6.403.047.256.

3. Aset Tetap Konsolidasian

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp52.506.072.404.067. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp5.110.550.561.446 atau 10,78 persen jika dibandingkan dengan Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp47.395.521.842.621.



Grafik 9. Struktur Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2015

Rincian Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.530.121.064.989 merupakan penggabungan Tanah pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp5.056.603.624.956 dan Tanah pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp6.473.517.440.033. Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp7.038.707.629.003 atau 156,71 persen dibandingkan dengan Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp4.491.413.435.986.
- b. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.488.168.128.609 merupakan penggabungan Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp3.159.265.168.790 dan Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp4.328.902.959.819. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp1.388.034.241.073 atau 15,64 persen dibandingkan dengan Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp8.876.202.369.682.
- c. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.929.304.380.231 merupakan penggabungan Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp2.853.943.995.234 dan Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp11.075.360.384.997. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar

- Rp593.909.849.727 atau 4,45 persen dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp13.335.394.530.504.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp37.109.539.758.368 merupakan penggabungan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp17.018.319.340.741 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp20.091.220.417.627. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp13.182.180.221.496 atau 55,09 persen dibandingkan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp23.927.359.536.872.
 - e. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.933.704.373.629 merupakan penggabungan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp1.187.973.730.303 dan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp745.730.643.326. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.243.637.850.399 atau 180,22 persen dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp690.066.523.230.
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.827.974.389.834 merupakan penggabungan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp3.121.143.871.980 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp706.830.517.854. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp3.144.348.144.285 atau 459,95 persen dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp683.626.245.549.
 - g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar (Rp23.312.739.691.593) merupakan penggabungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar (Rp7.960.845.307.857) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar (Rp15.351.894.383.736).

Jumlah Aset Tetap pada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp52.506.072.404.067 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Tanah	11.530.121.064.989	4.491.413.435.986
Peralatan dan Mesin	7.488.168.128.609	8.876.202.369.682
Gedung dan Bangunan	13.929.304.380.231	13.335.394.530.504
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.109.539.758.368	23.927.359.536.872
Aset Tetap Lainnya	1.933.704.373.629	690.066.523.230
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.827.974.389.834	683.626.245.549
Penyusutan	(23.312.739.691.593)	(4.608.540.799.202)
Jumlah	52.506.072.404.067	47.395.521.842.621

4. Aset Lainnya Konsolidasian

Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari antara lain Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian, Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian, Piutang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian, Penerusan Pinjaman Konsolidasian, Aset Tak Berwujud Konsolidasian, Dana yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian, Aset Lain-lain Konsolidasian, dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Aset Lainnya Konsolidasian.

Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing tercatat sebesar Rp2.190.771.002.155 dan Rp1.007.586.540.002, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.204.797.637 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Neraca Pemerintah Daerah. Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp561.912.558 atau 31,81 persen dibandingkan dengan Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp1.766.710.195.
- b. Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.951.055.654 merupakan penggabungan Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp84.567.430 dan Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp8.866.488.224. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp7.632.319.588 atau 578,76 persen dibandingkan dengan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp1.318.736.066.
- c. Piutang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp646.699.397.638 merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp556.716.031.250 atau 618,69 persen dibandingkan dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp89.983.366.388.
- e. Penerusan Pinjaman Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.
- f. Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp159.119.118.147 merupakan penggabungan Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp125.328.050.743 dan Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp33.791.067.404. Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp78.229.655.595 atau 96,71 persen dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp80.889.462.552. Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Pusat merupakan aset yang berupa software, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN.
- g. Dana yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.265.425.281 yang merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Pemerintah Pusat.
- h. Aset Lain-Lain Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.473.638.716.342 merupakan penggabungan Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp274.990.895.739 dan Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp1.198.647.820.603. Aset Lain-Lain Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp624.090.821.851 atau 73,46 persen dibandingkan dengan Aset Lain-Lain Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp849.547.894.491.
- i. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar (Rp100.107.508.544) dan (Rp15.919.629.690).

C.2. KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp624.471.426.616 dan Rp944.846.102.157.

1. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya, Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian, Uang Muka dari KPPN Konsolidasian, Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian, dan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian.

Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp587.777.133.330 dan Rp924.380.034.229, yang terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp15.754.661.940 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp537.348.232.095 atau 97,15 persen dibandingkan dengan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp553.102.894.035.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp58.470.465.219 merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Pusat. Utang Kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp55.986.778.280 atau 2.254,18 persen dibandingkan dengan Utang Kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp2.483.686.939.
- c. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.
- e. Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.
- f. Uang Muka dari KPPN Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah nihil.
- g. Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.774.380.048 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca Pemerintah Daerah. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp2.527.683.007 atau 59,52 persen dibandingkan dengan

Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp4.246.697.041.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 sebesar Rp506.777.626.123 merupakan penggabungan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp65.022.566.377 dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp441.755.059.746. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp144.436.115.510 atau 39,86 persen dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp362.341.510.613.

2. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp36.694.293.286 dan Rp20.466.367.928.

C.3. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Ekuitas Dana Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp59.022.529.828.817 yang merupakan penggabungan Ekuitas Dana pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp25.390.108.545.282 dan Ekuitas Dana pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp33.632.421.283.535. Ekiutas Dana Konsolidasian per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp7.775.356.182.209 atau 15,17 persen dibandingkan dengan Ekuitas Dana Konsolidasian per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp52.192.020.048.765.

C.4. ELIMINASI AKUN RESIPROKAL

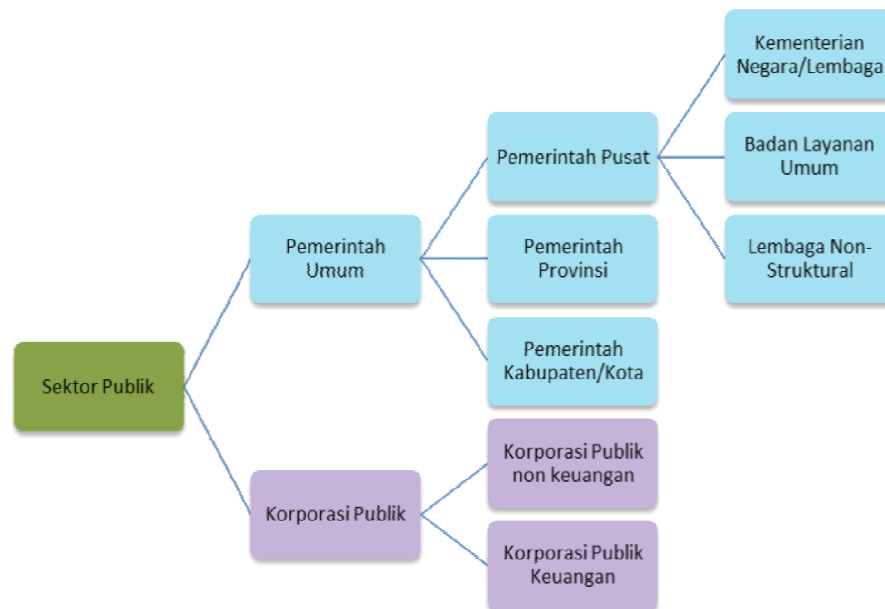
Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Namun proses eliminasi tersebut masih terkendala dengan tidak tersedianya informasi rinci untuk mengidentifikasi akun yang bersifat resiprokal antara Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Selain akun resiprokal, eliminasi dengan jumlah yang sama juga akan dilakukan terhadap akun pasangan dari akun yang dieliminasi karena sistem akuntansi yang diterapkan menganut sistem akun berpasangan. Untuk Neraca Pemerintah Konsolidasi Tingkat Wilayah tidak dilakukan eliminasi akun resiprokal karena hampir tidak ada transaksi resiprokal antara instansi pemerintah pusat di daerah (kementerian negara/lembaga) dengan pemerintah daerah.

D. LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN SEKTOR PEMERINTAH UMUM

D.1. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Data statistik keuangan pemerintah sektor publik dikompilasi dari sektor pemerintahan umum dan korporasi publik.



1. Sektor Pemerintah Umum

Sektor pemerintah umum mencakup Pempus dan Pemda. Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan. Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sektor pemerintah umum dibedakan menjadi: a) Pemerintah Pusat, b) Pemerintah Provinsi, dan c) Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsektor Pemerintah Pusat terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga termasuk BUN, BLU, Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

2. Sektor Korporasi Publik

Sektor korporasi publik mencakup sektor korporasi publik non keuangan dan sektor korporasi publik keuangan. Sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang

terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri.

Konsolidasi sektor publik dilakukan dengan identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Dalam mengkompilasi statistik untuk sektor publik ini, transaksi dan hubungan debitur dan kreditur antara sub sektor dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari proses konsolidasi. Total pelaporan sektor publik juga dikenal dengan pelaporan pemerintah secara keseluruhan (*whole of government reporting*).

Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi, yang berasal dari sistem akuntansi yang menghasilkan data akuntansi (merupakan sumber terbaik karena tepat waktu) dan laporan keuangan. Data transaksi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang melalui sistem akuntansi yang ada pada sektor pemerintah umum dan korporasi publik.

Dalam rangka memenuhi ketentuan metodologi pedoman Statistik Keuangan Pemerintah, data akuntansi tersebut akan diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan re-klasifikasi kedalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara mapping BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah.

Data yang akan di-*mapping* ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data Pemerintah Pusat, data konsolidasi Pemerintah Daerah, data perusahaan negara, dan data Bank Indonesia. Data hasil *mapping* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor pemerintah umum. Data hasil *mapping* perusahaan negara dan Bank Indonesia dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor korporasi publik. Data statistik keuangan konsolidasian sektor pemerintah umum akan dikonsolidasi dengan data statistik keuangan konsolidasian sektor korporasi publik menjadi data statistik keuangan konsolidasian sektor publik. Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan tiga laporan utama yaitu: Laporan Operasional, termasuk Arus Ekonomi Lain, Neraca, dan LAK.

D.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Kementerian Keuangan telah melakukan *mapping* BAS sistem akuntansi pemerintah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka penyusunan laporan statistik

keuangan pemerintah yang disampaikan ke *International Monetary Fund* (IMF). Namun *mapping* dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tersebut masih terbatas pada sub sektor Pemerintah Pusat.

Dalam rangka penyusunan Manual dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual, Pemerintah telah melakukan *exercise mapping* dan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian. Cakupan *exercise* penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ini adalah Sektor Pemerintah Umum, yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendekatan *mapping* BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah dilakukan dengan *high level mapping* terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan secara akuntansi, kemudian dilakukan *mapping* terhadap akun konsolidasian yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya data detail BAS Pemerintah Daerah.

Data yang tertuang dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah belum menggambarkan data yang sebenarnya dalam pengertian Statistik Keuangan Pemerintah, karena:

- a. Pendekatan *high level mapping* hanya memberikan gambaran secara umum mengenai laporan statistik keuangan pemerintah dan tidak memungkinkan penyajian BAS Statistik Keuangan Pemerintah secara detail.
- b. Keterbatasan data terkait akun resiprokal antar sektor.

D.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan 2 (dua) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri dari :

D.3.1. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (*net cost*) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (*full cost*) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi

Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

- a. Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban, dan;
- b. Pinjaman Neto (*Net Lending/Borrowing*, yang juga dikenal dengan saldo fiskal/*fiscal balance*) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Operasional periode ini dilakukan berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) menjadi BAS Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas.

Pendekatan *high level mapping* dilakukan dengan mapping data lembar muka laporan keuangan konsolidasian ke dalam laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Mapping BAS sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya dilakukan pada level BAS yang terendah untuk memastikan keakuratan mapping tersebut. Pendekatan *high level mapping* ini dilakukan karena keterbatasan data BAS detail pemerintah daerah. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan keakuratan *high level mapping* yaitu antara lain perbandingan dengan pola mapping BAS sistem akuntansi pemerintah pusat.

Secara umum, akun LRA Konsolidasian telah sejalan dengan akun Statistik Keuangan Pemerintah terutama untuk klasifikasi pendapatan dan belanja. Pengecualian hanya dilakukan untuk belanja modal yang di-mapping menjadi *Net Acquisition of Nonfinancial Assets*. Pembiayaan Konsolidasian (neto) di-mapping menjadi transaksi dalam aset keuangan dan kewajiban. Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2015, Pendapatan mencapai Rp9.366.726.792.598 yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp7.198.858.285.047 Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp698.843.428.903 dan Pendapatan Lainnya Konsolidasian sebesar Rp1.469.025.078.647.

Beban mencapai Rp21.582.688.560.133 yang terdiri dari Kompensasi Pegawai sebesar Rp9.897.137.054.803 Penggunaan Barang dan Jasa sebesar Rp6.938.253.312.059 Bunga Utang sebesar Rp803.990.883 Subsidi sebesar Rp63.035.759.694 Hibah sebesar Rp4.089.412.570.859 Manfaat Sosial sebesar Rp578.402.747.820 dan Beban Lainnya sebesar Rp15.643.124.015.

Saldo Operasi Bruto/Neto (*Gross/Net Operating Balance*) sebesar (Rp12.215.961.767.535) yang setelah dikurangi dengan Akuisisi Aset Non Keuangan Neto sebesar Rp8.943.082.113.793 menghasilkan angka Pinjaman Neto (*Net Lending/Borrowing*) sebesar (Rp21.159.043.881.328). Pinjaman Neto tersebut ditutupi oleh

Akuisisi Aset Keuangan Neto (*Net Acquisition of Financial Assets*) sebesar (Rp21.183.692.788.414) dikurangi Keterjadian Kewajiban Neto (*Net Incurrence of Liabilities*) sebesar (Rp24.648.907.086).

Berikut Mapping LRA Konsolidasian Tahun 2015 ke dalam Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan pendekatan *high level mapping*, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan Pemerintah Umum.

Pendapatan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2015 dan 2014 mencapai Rp9.366.726.792.598 dan Rp22.228.476.596.681 yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan 2015 dan 2014 sebesar Rp7.198.858.285.047 dan Rp6.343.609.328.440 Pendapatan Hibah Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp698.843.428.903 dan Rp14.608.613.713.353 dan Pendapatan Lainnya Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp1.469.025.078.647 dan Rp1.276.253.554.888 .

b. Beban Pemerintah Umum.

Beban Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2015 dan 2014 mencapai Rp21.582.688.560.133 dan Rp22.466.611.472.337 yang terdiri dari :

- 1) Kompensasi Pegawai Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp9.897.137.054.803 dan Rp8.898.534.992.015.
- 2) Penggunaan Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp6.938.253.312.059 dan Rp6.150.117.503.028.
- 3) Konsumsi Aset Tetap untuk tahun 2015 belum ada karena informasi mengenai nilai Aset Tetap yang dihapuskan/dikeluarkan belum tersedia. Sedangkan untuk tahun 2014, Konsumsi Aset Tetap di mapping dari akumulasi penyusutan.
- 4) Bunga Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp803.990.883 dan Rp0.
- 5) Subsidi Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp63.035.759.694 dan Rp7.358.650.483 .
- 6) Hibah Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp4.089.412.570.859 dan Rp1.069.809.355.982.
- 7) Manfaat Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp578.402.747.820 dan Rp705.763.686.498.
- 8) Beban Lainnya Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp15.643.124.015 dan Rp1.329.662.744.239.

c. Saldo Operasi Bruto Tahun 2015 dan 2014 yang merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dan beban, sebesar (Rp12.215.961.767.535) dan Rp4.067.229.664.435.

d. Transaksi Aset Non Keuangan, berupa Akuisisi Neto Aset Non Keuangan, Tahun 2015 dan 2014, sebesar Rp8.943.082.113.793 dan Rp1.424.523.158.625 terdiri dari Akuisisi Neto Aset Tetap Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp8.924.768.275.469 dan

Rp3.110.054.295.299 Perubahan Persediaan Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp0 dan (Rp360.271.404.696) serta Aset yang Non Produksi Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp18.313.838.324 dan (Rp1.325.259.731.979).

- e. Pinjaman Neto (*Net Lending/Borrowing*) Tahun 2015 dan 2014 sebesar (Rp21.159.043.881.328) dan (Rp1.662.658.034.280).
- f. Transaksi Aset Keuangan Neto Tahun 2015 dan 2014 sebesar (Rp21.183.692.788.414) dan (Rp1.417.047.326.214).
- g. Keterjadian Kewajiban Neto Tahun 2015 dan 2014 sebesar (Rp24.648.907.086) dan Rp245.610.708.066.
- h. SILPA Pemerintah Pusat untuk Tahun 2015 dan 2014 sebesar (Rp20.075.442.735.942) dan (Rp994.060.944.330).

D.3.2. Neraca

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah, pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur. Struktur klasifikasi aset keuangan/kewajiban baik dalam negeri (domestik) maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

a. Uang dan Deposito.

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran. Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya.

b. Surat Berharga selain Saham.

Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau

hal lain yang bernilai ekonomis.

c. Pinjaman.

Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut.

d. Saham dan Ekuitas Lain.

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan.

e. Cadangan Teknis Asuransi.

Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum dibayar.

f. Derivatif Keuangan.

Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan lainnya, indikator atau komoditas tertentu dan dapat diperjualkan dalam pasar keuangan dengan resiko keuangan tertentu.

g. Piutang/Utang Lain.

Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.

Aset dan kewajiban Pemerintah Umum terdiri dari konsolidasi aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Mapping data kewajiban Pemerintah Umum ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah (Dalam Negeri/Domestik dan Luar Negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban tersebut (Rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur. Kewajiban dengan mata uang Rupiah diklasifikasikan sebagai kewajiban dalam negeri (*domestik*) dan kewajiban dengan mata uang asing diklasifikasikan sebagai kewajiban luar negeri. Laporan statistik keuangan pemerintah ini juga belum dapat menggambarkan keterkaitan antara arus (*flow*) dan posisi (*stock*) secara sempurna.

Mapping Neraca Konsolidasian per 31 Desember 2015 ke dalam Neraca Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan pendekatan *high level mapping*, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aset Keuangan Pemerintah Umum.

Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.608.186.651.157 dan Rp3.624.039.080.381. Aset Keuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Aset Keuangan Domestik - Uang dan Deposito
Aset Keuangan Domestik - Uang dan Deposito terdiri dari uang dan deposito yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aset Keuangan Domestik - Uang dan Deposito per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.462.177.777.829 dan Rp1.200.399.805.422.
2. Aset Keuangan Domestik – Pinjaman.
Aset Keuangan Domestik - Pinjaman per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.114.587.366 dan Rp9.127.614.789.
3. Aset Keuangan Domestik - Saham dan Ekuitas Lain.
Aset Keuangan Domestik - Saham dan Ekuitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.818.683.499.207 dan Rp1.316.433.171.752.
4. Aset Keuangan Domestik - Piutang Lainnya.
Aset Keuangan Domestik - Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.325.210.786.755 dan Rp1.098.078.488.417.

b. Aset Non Keuangan Pemerintah Umum.

Aset Non Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp78.942.179.912.567 dan Rp48.411.004.879.940. Aset Non-Keuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Aset Tetap.
Aset Tetap meliputi Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya. Konsolidasi Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp66.568.148.262.798 dan Rp43.908.609.500.376.
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp54.866.818.528.433 dan Rp37.946.380.312.926.
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp7.488.168.128.609 dan Rp8.876.202.369.682.
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.213.161.605.756 dan Rp1.694.567.616.970.
2. Konsolidasi Persediaan.
Konsolidasi Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp843.910.584.780 dan Rp10.981.943.578.
3. Aset Non Produksi.
Konsolidasi Aset Non Produksi yaitu berupa Tanah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp11.530.121.064.989 dan Rp4.491.413.435.986.

c. Kewajiban Pemerintah Umum.

Kewajiban Pemerintah Umum per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp624.471.426.616 dan Rp72.926.371.863 terdiri dari :

1. Kewajiban Domestik - Pinjaman.

Pinjaman per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp17,66M dan Rp0.

2. Kewajiban Domestik - Utang Lainnya.

Utang Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp606,80M dan Rp72,93M.

D.3.3. Laporan Arus Kas.

LAK mencatat arus kas masuk dan keluar pemerintah yang dialokasikan di antara berbagai aktivitas dan pengaruh bersihnya terhadap saldo kas. LAK mengungkapkan bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan kas. Laporan ini mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi investasi dan pembiayaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang terkait dengan pengumpulan pajak, hibah, dan penyediaan barang dan jasa. Aktivitas investasi adalah aktivitas yang terkait dengan akuisisi dan penghentian aset keuangan dan non keuangan. Aktivitas pembiayaan terkait dengan perubahan ukuran dan komposisi struktur keuangan pemerintah.

LAK melaporkan dua ukuran fiskal yaitu kenaikan bersih pada kas dan surplus/defisit kas. Kenaikan bersih pada kas adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Surplus/defisit kas terdiri dari kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dengan penjualan dan dikurangi pembelian aset non keuangan.

Penyusunan LAK Statistik Keuangan Pemerintah periode ini dilakukan dengan *high level mapping* melalui pendekatan tidak langsung (*indirect method*), yang dilakukan dengan *mapping* terhadap LRA Konsolidasian dan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan LAK Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2015, terdapat penurunan kas sebesar (Rp21.389.268.134.347) bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar (Rp32.074.441.048.685).

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada tahun 2015 sebesar Rp9.366.726.792.598 mengalami penurunan sebesar Rp12.861.749.804.083 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp22.228.476.596.681.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari pendapatan Pajak sebesar Rp7.198,858.285.047, Hibah sebesar Rp698.843.428.903 dan Penerimaan Lainnya sebesar Rp1.469.025.078.647.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi pada tahun 2015 sebesar Rp21.582.688.560.133 mengalami peningkatan sebesar Rp3.781.713.032.759 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp17.800.975.527.550.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari Kompensasi Pegawai sebesar Rp9.897.137.054.803, Pembelian Barang dan Jasa sebesar Rp6.938.253.312.059, Bunga sebesar Rp803.990.883, Subsidi sebesar Rp63.035.759.694, Hibah sebesar Rp4.089.412.570.859, Manfaat Sosial sebesar Rp578.402.747.820 dan Pembayaran Lainnya sebesar Rp15.643.124.015.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun 2015 berupa Pembelian dan Penjualan Aset Non Keuangan. Pembelian Aset Non Keuangan tahun 2015 berupa Aset Tetap sebesar Rp8.925.291.277.594 dan Aset Non Produksi sebesar Rp18.313.838.324. Pembelian Aset Non Keuangan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp3.430.349.308.128 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp5.513.255.807.790. Penjualan Aset Non Keuangan tahun 2015 berupa Aset Tetap sebesar Rp523.002.125 mengalami penurunan sebesar Rp730.053.403 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp1.253.055.528. Defisit Kas sebesar (Rp21.159.043.881.328) pada tahun 2015 lebih besar (Rp20.074.542.198.197) bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar (Rp1.084.501.683.131).

Dalam LKPP-TW, terdapat perbedaan data yang cukup signifikan antara LRA dengan LAK tahun 2015. Hal ini disebabkan karena LAK disusun berdasarkan realisasi kas yang masuk dan keluar melalui rekening yang ada pada KBUN-D sedangkan LRA disusun berdasarkan realisasi domisili satker pengguna APBN. Berikut tabel perbandingan diantara keduanya :

URAIAN	LAK	LRA	Selisih
Pendapatan Perpajakan	3.812.047.000.000	5.227.128.000.000	(1.415.081.000.000)
Pendapatan PNPB	270.687.000.000	409.972.000.000	(139.285.000.000)
Pendapatan Hibah	194.677.000.000	-	194.677.000.000
Jumlah Pendapatan	4.277.411.000.000	5.637.100.000.000	(1.359.689.000.000)
Belanja Pegawai	147.354.000.000	2.843.336.000.000	(2.695.982.000.000)
Belanja Barang	662.007.000.000	2.567.285.000.000	(1.905.278.000.000)
Belanja Modal	13.897.000.000	4.006.374.000.000	(3.992.477.000.000)
Belanja Bansos	(2.596.000.000)	545.046.000.000	(547.642.000.000)
Jumlah Belanja	820.662.000.000	9.962.041.000.000	(9.141.379.000.000)
SURPLUS/DEFISIT	3.456.749.000.000	(4.324.941.000.000)	7.781.690.000.000

Berdasarkan data diatas, maka penyusunan LAK Statistik Keuangan Pemerintah Pusat lebih tepat bila menggunakan data LRA karena lebih menggambarkan realisasi yang sesungguhnya terjadi di wilayah.

LAMPIRAN I

➤ **LKPP-TW**

➤ **MAPPING LSKPP-TW**



Tugu Digulis
salah satu ikon kota Pontianak

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Mapping Pemerintah Pusat Tahun 2015

		Per Provinsi	Mapping GFS	
		5.637.352.256.738	5.636.829.254.613	Jml Pendapatan
		27.045.965.462.450	22.658.133.294.950	Jml Belanja dan Transfer
		(21.408.613.205.712)	(21.408.613.205.712)	Saldo Operasi
Jml Pend. Pemerintah Pusat per Provinsi				
Jml Belanja dan Transfer Pempus per Provinsi				
Surplus/Defisit				
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat				
Nama Akun	Jumlah per Provinsi	Jumlah per Provinsi	Mapping Pemerintah Pusat	
Mapping GFS				
A. Pendapatan				
I. Penerimaan Perpajakan				
1. Pajak Dalam Negeri	5.142.573.153.083	5.142.573.153.083	Pajak	
2. Pajak Perdagangan Internasional	84.555.692.925	84.555.692.925	Pajak	
Jumlah Penerimaan Perpajakan	5.227.128.846.008	5.227.128.846.008	Jumlah Pajak	
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak				
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	Pendapatan Lainnya	
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	0	0	Pendapatan Lainnya	
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	347.266.070.319	346.743.068.194	Pendapatan Lainnya	
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	347.266.070.319	(523.002.125)	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)	
4. Pendapatan BLU	62.957.340.411	62.957.340.411	Pendapatan Lainnya	
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	410.223.410.730	409.700.408.605	Jumlah Pendapatan Lainnya	
III. Penerimaan Hibah				
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)	5.637.352.256.738	5.636.829.254.613	Jumlah Pendapatan	
B. Belanja				
I. Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah				
1. Belanja Pegawai	2.843.324.188.072	2.843.324.188.072	Kompensasi Pegawai	
2. Belanja Barang*	2.567.250.962.080	2.567.250.962.080	Penggunaan Barang dan Jasa	
		0	Hibah (Beban)	
		0	Perubahan Persediaan (Aset Non Keuangan Neto)	
3. Belanja Modal	4.387.832.167.500	4.369.518.329.176	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)	
		18.313.838.324	Aset Non Produksi (Aset Non Keuangan Neto)	
4. Pembayaran Bunga Utang	0	0	Bunga	
5. Subsidi	0	0	Subsidi	
6. Hibah	0	0	Hibah (Beban)	
7. Bantuan Sosial	545.002.968.739	545.002.968.739	Manfaat Sosial	
8. Belanja Lain-lain	0	0	Beban Lainnya	
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	10.343.410.286.391	10.343.410.286.391		

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat		Mapping Pemerintah Pusat	
Nama Akun	Jumlah per Provinsi	Jumlah per Provinsi	Mapping GFS
II. Transfer ke Daerah			
1. Transfer Dana Perimbangan	0	0	Hibah (Beban)
a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	464.886.646.977	464.886.646.977	Hibah (Beban)
b. Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	309.386.080.520	309.386.080.520	Hibah (Beban)
c. Transfer Dana Alokasi Umum	10.828.143.477.000	10.828.143.477.000	Hibah (Beban)
d. Transfer Dana Alokasi Khusus	1.786.940.708.000	1.786.940.708.000	Hibah (Beban)
Jumlah Belanja Transfer Dana Perimbangan	13.389.356.912.497	13.389.356.912.497	Hibah (Beban)
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0	0	Hibah (Beban)
a. Transfer Dana Otonomi Khusus	33.788.893.000	33.788.893.000	Hibah (Beban)
b. Transfer Dana Penyesuaian	2.423.630.180.348	2.423.630.180.348	Hibah (Beban)
Jumlah Belanja Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.457.419.073.348	2.457.419.073.348	Hibah (Beban)
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	779.216.706.497	779.216.706.497	Hibah (Beban)
a. Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.562.483.717	76.562.483.717	Hibah (Beban)
b. Transfer Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	855.779.190.214	855.779.190.214	Hibah (Beban)
Jumlah Belanja Transfer Pemda Lainnya/Provinsi	855.779.190.214	855.779.190.214	Hibah (Beban)
4. Transfer Bantuan Keuangan	0	0	Hibah (Beban)
Bantuan Keu. dari Pem. Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	0	0	Hibah (Beban)
Jumlah Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	0	Hibah (Beban)
Jumlah Transfer ke Daerah	16.702.555.176.059	16.702.555.176.059	
Jumlah Belanja dan Transfer ke Daerah (B.I + B.II)	27.045.965.462.450	22.658.133.294.950	Jumlah Beban
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(21.408.613.205.712)	(21.408.613.205.712)	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015		
Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		
A1	Pendapatan	5.636.829.254.613
A11	Pajak	5.227.128.846.008
A12	Kontribusi Sosial	0
A13	Hibah	0
A14	Pendapatan Lainnya	409.700.408.605
A2	Behan	22.658.133.294.950
A21	Kompensasi Pegawai	2.843.324.188.072
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	2.567.250.962.080
A23	Konsumsi Aset Tetap	0
A24	Bunga	0
A25	Subsidi	0
A26	Hibah	16.702.555.176.059
A27	Manfaat Sosial	545.002.968.739
A28	Beban Lainnya	0
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	(17.021.304.040.337)
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	(17.021.304.040.337)
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.387.309.165.375
A311	Aset Tetap	4.368.995.327.051
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	0
A314	Aset Non Produksi	18.313.838.324
NLB	Saldo Peninjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(21.408.613.205.712)
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	21.408.613.205.712
A321	Dalam Negeri	(21.408.613.205.712)
A322	Luar Negeri	0
A323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	0
A331	Dalam Negeri	0
A332	Luar Negeri	0
SILPA Pemerintah Pusat		(21.408.613.205.712)
Periksa Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peninjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
		(0)

LAPORAN ARUS KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015		
Kode	Akun GFS	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	5.636.829.254.613
C11	Pajak	5.227.128.846.008
C12	Kontribusi Sosial	0
C13	Hibah	0
C14	Penerimaan Lainnya	409.700.408.605
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	22.658.133.294.950
C21	Kompensasi Pegawai	2.843.324.188.072
C22	Pembelian Barang dan Jasa	2.567.250.962.080
C24	Bunga	0
C25	Subsidi	0
C26	Hibah	16.702.555.176.059
C27	Manfaat Sosial	545.002.968.739
C28	Pembayaran Lainnya	0
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (1-2-ADJz).	(17.021.304.040.337)
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN (NFAs):		
C31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	4.387.832.167.500
C31.1.1	Aset Tetap	4.369.518.329.176
C312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0
C313.1	Barang Berharga	0
C314.1	Aset Non Produksi	18.313.838.324
C31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	523.002.125
C311.2	Aset Tetap	523.002.125
C312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0
C313.2	Barang Berharga	0
C314.2	Aset Non Produksi	0
C31	Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31.1-31.2)	4.387.309.165.375
CSD	Surplus / Defisit Kas (1-2-ADJz-31+CSDz)	(21.408.613.205.712)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN :		
C32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	0
C321x	Domestik	0
C322x	Luar Negeri	0
C323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	0
C331	Domestik	0
C332	Luar Negeri	0
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	0
NCB	Perubahan Kas Bersih (CSD - C32 + C33)	(21.408.613.205.712)

* / Saldo Operasi Neto terjumlahkan hanya jika Konsumsi Aset Tetap (23) tidak bernilai Nol. Jika tidak, hanya Saldo Operasi Bruto yang akan terjumlahkan.

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN MAPPING KE GFS
PER 31 DESEMBER 2015

ASET	Uraian	KONSOL SATKER & KBUN	Mapping ke GFS		Jumlah
			Kode	Klasifikasi GFS	
Aset Lancar					
Kas dan Bank					
	Kas di Kas Negara (Rekening Kas di KPPN/BUN/Rek. Lainnya)	2.547.258.477	A6212	FA Domestic Currency and deposits	2.547.258.477
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.289.059.281	A6212	FA Domestic Currency and deposits	1.289.059.281
	Kas di Bendahara Penerimaan	137.625.318	A6212	FA Domestic Currency and deposits	137.625.318
	Kas Lainnya dan Setara Kas	59.987.349.275	A6212	FA Domestic Currency and deposits	59.987.349.275
	Kas pada BLU	25.690.813.681	A6212	FA Domestic Currency and deposits	25.690.813.681
	Jumlah Kas dan Bank	89.652.106.032			89.652.106.032
	Belanja dibayar di muka	1.229.613.788	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	1.229.613.788
	Utang Muka Belanja	0	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	0
	Utang				
	Utang Pajak	596.685.910.537	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	596.685.910.537
	Utang Bukan Pajak	76.975.448.303	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	76.975.448.303
	Utang dari Kegiatan BLU	0	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	0
	Penyisihan Utang Tidak Tertagih	-394.922.340.823	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	0
	Jumlah Utang	278.799.018.017			673.721.358.840
	Investasi Jangka Pendek	4.000.000.000	A6212	FA Domestic Currency and deposits	4.000.000.000
	Persediaan	401.954.984.245	A6112	Inventories	401.954.984.245
	Jumlah Aset Lancar	775.635.722.082			1.170.558.062.905
Aset Tetap					
	Tanah	5.056.603.624.956	A6141	Land	5.056.603.624.956
	Peralatan dan Mesin	3.159.265.168.790	A6112	NonFA Machinery and equipment	3.159.265.168.790
	Gedung dan Bangunan	2.853.943.995.234	A6111	NonFA Buildings and structures	2.853.943.995.234
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.018.319.340.741	A6111	NonFA Buildings and structures	17.018.319.340.741
	Aset Tetap Lainnya	1.187.973.730.303	A6113	NonFA Other fixed assets	1.187.973.730.303
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.121.143.871.980	A6111	NonFA Buildings and structures	3.121.143.871.980
	Akumulasi Penyusutan	-7.960.845.307.857			
	Jumlah Aset Tetap	24.436.404.424.147			32.397.249.732.004
Dana Cadangan					
	Dana Cadangan	0	A6212	FA Domestic Currency and deposits	0
	Jumlah Dana Cadangan	0			0

Aset Lainnya	Uraian	KONSOL SATKER & KBUN	Mapping ke GFS		
			Kode	Klasifikasi GFS	Jumlah
	Tagihan Penjualan Angsuran	0	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	0
	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	84.567.430	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	84.567.430
	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	A6214	FA Domestic Loans	0
	Kemitaan Dengan Pihak Ketiga	0	A6113	NonFA Other fixed assets	0
	Penrusan Pinjaman	0	A6214	FA Domestic Loans	0
	Aset Tak Berwujud	125.328.050.743	A6113	NonFA Other fixed assets	125.328.050.743
	Aset (Dana) yang Dibatasi Penggunaannya	1.265.425.281	A6212	FA Domestic Currency and deposits	1.265.425.281
	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan	0	A6212	FA Domestic Currency and deposits	0
	Dana Penjaminan	0	A6212	FA Domestic Currency and deposits	0
	Aset Lain-lain	274.990.895.739	A6111	NonFA Buildings and structures	274.990.895.739
			A6113	NonFA Other fixed assets	0
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	-100.107.508.544			-100.107.508.544
	Jumlah Aset Lainnya	301.561.430.649			301.561.430.649
JUMLAH ASET KEWAJIBAN		25.513.601.576.878			33.869.369.225.558
Kewajiban Jangka Pendek					
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	0
	Utang Kepada Pihak Ketiga	58.470.465.219	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	58.470.465.219
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0	A6314	Liabilities Domestic Loans	0
	Utang Biaya Pinjaman	0	A6313	Liabilities Domestic Securities other than shares	0
	Pendapatan Diterima Dimuka	0	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	0
	Utang Jangka Pendek Lainnya	65.022.566.377	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	65.022.566.377
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	123.493.031.596			123.493.031.596
Kewajiban Jangka Panjang					
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	0
	Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0			0
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0			0
JUMLAH KEWAJIBAN		123.493.031.596			123.493.031.596
Ekuitas		25.390.108.545.282			25.390.108.545.282
JUMLAH EKUITAS		25.390.108.545.282	A6	NET WORTH	33.745.876.193.962
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		25.513.601.576.878			

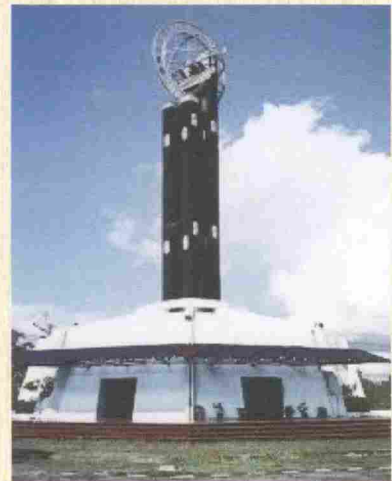
NERACA GFS PEMERINTAH PUSAT PER 31 DESEMBER 2015

Kode	Akun GFS	Tahun 2015
A6	KEKAYAAN BERSIH	33.845.983.702.506
A61	ASET NON KEUANGAN	33.199.523.662.731
A611	ASET TETAP	27.740.965.053.530
A6111	Gedung dan Bangunan	22.993.407.207.955
A6112	Mesin dan Peralatan	3.159.265.168.790
A6113	Aset Tetap Lainnya	1.588.292.676.785
	Akumulasi Depresiasi	0
A612	Persediaan	401.954.984.245
A613	Barang Berharga	
A614	Aset Non Produksi	5.056.603.624.956
A6141	Tanah	5.056.603.624.956
A6142	Sunber Daya energi dan Mineral	0
A6143	Aset yang timbul secara alamiah lainnya	0
A6144	Aset Non Produksi tidak berwujud	0
A62	Aset Keuangan [621+622+623]	769.953.071.371
A6202	Uang dan Deposito [6212+6222]	94.917.531.313
A6203	Surat Berharga Utang [6213+6223]	0
A6208	Piutang lainnya [6218+6228]	675.035.540.058
A621	Dalam Negeri	769.953.071.371
A6212	Uang dan Deposito dalam mata uang domestik	94.917.531.313
A6213	Surat berharga utang dalam negeri	0
A6218	Piutang Lainnya dalam negeri	675.035.540.058
A622	Luar Negeri	
A6222	Uang dan Deposito dalam mata uang asing	0
A6223	Surat berharga utang luar negeri	0
A6228	Piutang Lainnya Luar Negeri	0
A63	Kewajiban [631+632]	123.493.031.596
A6302	Uang dan Deposito [6312+6322]	-
A6303	Surat Berharga Utang[6313+6323]	0
A6304	Pinjaman [6314+6324]	0
A6308	Utang Lainnya [6318+6328]	123.493.031.596
A631	Domestik	123.493.031.596
A6312	Uang dan Deposito Dalam Negeri	0
A6313	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	0
A6314	Pinjaman Dalam Negeri	0
A6318	Utang Lainnya Dalam Negeri	123.493.031.596
A632	Luar Negeri	-
A6322	Uang dan Deposito Luar Negeri	0
A6323	Surat Berharga Utang Luar Negeri	0
A6324	Pinjaman Luar Negeri	0
A6328	Utang Lainnya Luar negeri	0

LAMPIRAN II

➤ **LKPD-K**

➤ **MAPPING LSKPD**



Tugu Khatulistiwa

Dibangun 31 Maret 1928 oleh tim ekspedisi geografi internasional sebagai penanda titik 0 derajat yang membagi bumi bagian utara dan selatan

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Mapping Pemerintah Daerah Tahun 2015

	Per Provinsi	Mapping GFS
Jumlah Pendapatan Daerah	20.432.452.714,045	20.432.452.714,045 Jumlah Pendapatan
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah	20.182.883.389,660	15.627.110.441,242 Jumlah Belanja dan Transfer
Surplus/Defisit	249.569.324,385	4.805.342.272,802 Saldo Operasi
		4.555.772.948,418 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto
Jumlah Pembiayaan	1.083.601.145,386	200.271.510,213 Jumlah Pembiayaan
SILPA	1.333.170.469,771	

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah		Mapping Pemerintah Daerah	
A. Pendapatan Pemerintah Daerah	Jumlah	Jumlah	Mapping GFS
I. Pendapatan Asli Daerah			
1. Pajak Daerah	1.971.729.439,039	1.971.729.439,039	Pajak
2. Retribusi Daerah	249.069.259,581	249.069.259,581	Pendapatan lainnya
3. Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yang Dipisahkan	137.336.256,358	137.336.256,358	Pendapatan Lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	545.853.176,261	545.853.176,261	Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.903.988.131,239	2.903.988.131,239	
II. Pendapatan Transfer			
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil	0	0	Hibah (Pendapatan)
a. Dana Bagi Hasil Pajak	464.886.646,977	464.886.646,977	Hibah (Pendapatan)
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	309.386.080,520	309.386.080,520	Hibah (Pendapatan)
c. Dana Alokasi Umum	10.828.143.477,000	10.828.143.477,000	Hibah (Pendapatan)
d. Dana Alokasi Khusus	1.786.940.708,000	1.786.940.708,000	Hibah (Pendapatan)
Jumlah Transfer Pemus Dana Perimbangan	13.389.356.912,497	13.389.356.912,497	
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	Hibah (Pendapatan)
a. Dana Otonomi Khusus	33.788.893,000	33.788.893,000	Hibah (Pendapatan)
b. Dana Penyesuaian	2.423.630.180,348	2.423.630.180,348	Hibah (Pendapatan)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.457.419.073,348	2.457.419.073,348	
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi			
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	779.216.706,497	779.216.706,497	Hibah (Pendapatan)
b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	76.562.483,717	76.562.483,717	Hibah (Pendapatan)
Jumlah Transfer Pemda Lainnya/Provinsi	855.779.190,214	855.779.190,214	
4. Transfer Bantuan Keuangan			
Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	267.063.400,000	267.063.400,000	Hibah (Pendapatan)
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	267.063.400,000	267.063.400,000	
Jumlah Pendapatan Transfer	16.969.618.576,059	16.969.618.576,059	

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah		Mapping Pemerintah Daerah	
Nama Akun	Jumlah	Jumlah	Mapping GFS
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1. Pendapatan Hibah	0	0	Hibah (Pendapatan)
a. Hibah dari Pemerintah Pusat	377.665.407.903	377.665.407.903	Hibah (Pendapatan)
b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	54.114.621.000	54.114.621.000	Hibah (Pendapatan)
c. Hibah dari Swasta Dalam Negeri	0	0	Hibah (Pendapatan)
d. Hibah dari Masyarakat/Perorangan	0	0	Hibah (Pendapatan)
Jumlah Pendapatan Hibah	431.780.028.903	431.780.028.903	
2. Pendapatan dari Dana Darurat	0	0	Hibah (Pendapatan)
Dana Darurat	0	0	
Jumlah Pendapatan dari Dana Darurat	0	0	
3. Pendapatan Lainnya	127.065.977.842	127.065.977.842	Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lain-lain	127.065.977.842	127.065.977.842	
Jumlah Pendapatan Lainnya	558.846.006.746	558.846.006.746	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	20.432.452.714.045	20.432.452.714.045	
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)			
B. Belanja Negara			
I. Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	7.053.812.866.731	7.053.812.866.731	Kompensasi Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa	4.371.002.349.979	4.371.002.349.979	Penggunaan Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga	803.990.883	803.990.883	Bunga
4. Subsidi	63.035.759.694	63.035.759.694	Subsidi
5. Hibah	1.716.500.913.147	1.716.500.913.147	Hibah (Beban)
6. Bantuan Sosial	33.399.779.081	33.399.779.081	Manfaat Sosial
Jumlah Belanja Operasi	13.238.555.659.516	13.238.555.659.516	
II. Belanja Modal	0	0	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
1. Belanja Modal Tanah	59.482.982.967	59.482.982.967	Aset Non Produksi (Aset Non Keuangan Neto)
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	580.036.301.229	580.036.301.229	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.205.311.777.428	1.205.311.777.428	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
4. Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan	2.623.544.162.041	2.623.544.162.041	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.881.904.253	82.881.904.253	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
6. Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
7. Belanja Modal/Aset Lainnya	4.515.820.500	4.515.820.500	Aset Tetap (Aset Non Keuangan Neto)
Jumlah Belanja Modal	4.555.772.948.418	4.555.772.948.418	
III. Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga	15.643.124.015	15.643.124.015	Behan Lainnya
Jumlah Belanja Tak Terduga	15.643.124.015	15.643.124.015	
Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III)	17.809.971.731.949	17.809.971.731.949	

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah		Mapping Pemerintah Daerah	
Nama Akun	Jumlah	Jumlah	Mapping GFS
C. Transfer			
I. Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0	0	Hibah (Beban)
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	853.392.372.413	853.392.372.413	Hibah (Beban)
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	37.367.537.890	37.367.537.890	Hibah (Beban)
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	890.759.910.303	890.759.910.303	
II. Transfer Bantuan Keuangan	0	0	Hibah (Beban)
1. Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya	456.650.634.904	456.650.634.904	Hibah (Beban)
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	839.247.093.746	839.247.093.746	Hibah (Beban)
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	186.254.018.758	186.254.018.758	Hibah (Beban)
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	1.482.151.747.408	1.482.151.747.408	
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah	2.372.911.657.711	2.372.911.657.711	Jumlah Beban
JML BELANJA DAN TRANSFER (B + C)	20.182.883.389.660	20.182.883.389.660	Total Saldo Operasi
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	249.569.324.385	249.569.324.385	
E. Pembiayaan			
I. Penerimaan Pembiayaan			
1. Penggunaan SILPA	1.313.825.398.406	(1.313.825.398.406)	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
3. Hasil Penjualan Kek. Daerah yang Dipisahkan	0	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
4. Pinjaman Dalam Negeri	42.602.000.000	42.602.000.000	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
5. Penerimaan Kembali Pinjaman	233.822.800	(233.822.800)	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
6. Pen. Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	(934.866.703)	934.866.703	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0	Luar Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.355.726.354.503	(1.270.522.354.503)	
II. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	204.519.639.198	204.519.639.198	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	67.250.907.086	(67.250.907.086)	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
4. Pemberian Pinjaman Daerah	354.662.833	354.662.833	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	0	Luar Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	272.125.209.117	137.623.394.945	
Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II)	1.083.601.145.386	1.333.170.469.771	
F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	1.333.170.469.771	1.333.170.469.771	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015		
Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
TRANSAKSI YANG MEMPERTANGGUNGHI KEKAYAAN BERSIH :		
A1	Pendapatan	20.432.452.714,045
A11	Pajak	1.971.729.439,039
A12	Kontribusi Sosial	0
A13	Hibah	17.401.398.604,963
A14	Pendapatan Lainnya	1.059.324.670,042
A2	Beban	15.627.110.441,242
A21	Kompensasi Pegawai	7.053.812.866,731
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	4.371.002.349,979
A23	Konsumsi Aset Tetap	0
A24	Bunga	803.990.883
A26	Subsidi	63.035.759,694
A27	Hibah	4.089.412.570,859
A28	Manfaat Sosial	33.399.779,081
A28	Beban Lainnya	15.643.124,015
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	4.805.342.272,802
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	4.805.342.272,802
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.555.772.948,418
A311	Aset Tetap	4.496.289.965,451
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	0
A314	Aset Non Produksi	59.482.982,967
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	249.569.324,385
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWALIBAN (PEMBIAAYAAN) :		
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(249.569.324,385)
A321	Dalam Negeri	224.920.417,299
A322	Luar Negeri	224.920.417,299
A323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(24.648.907,086)
A331	Dalam Negeri	(24.648.907,086)
A332	Luar Negeri	0
SILPA	Konsolidasian	1.333.170.469,771
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
		0

* / Saldo Operasi Neto berjumlah hanya jika Konsumsi Aset Tetap (23) tidak bernilai Nol. Jika tidak, hanya Saldo Operasi Bruto yang akan berjumlah.

LAPORAN ARUS KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015		
Kode	Akun GFS	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	20.432.452.714,045
C11	Pajak	1.971.729.439,039
C12	Kontribusi Sosial	0
C13	Hibah	17.401.398.604,963
C14	Penerimaan Lainnya	1.059.324.670,042
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	15.627.110.441,242
C21	Kompensasi Pegawai	7.053.812.866,731
C22	Pembelian Barang dan Jasa	4.371.002.349,979
C24	Bunga	803.990.883
C25	Subsidi	63.035.759,694
C26	Hibah	4.089.412.570,859
C27	Manfaat Sosial	33.399.779,081
C28	Pembayaran Lainnya	15.643.124,015
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (1-2-ADJz)	4.805.342.272,802
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN (NFAs) :		
C31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	4.555.772.948,418
C311.1	Aset Tetap	4.496.289.965,451
C312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0
C313.1	Barang Berharga	0
C314.1	Aset Non Produksi	59.482.982,967
C31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	0
C311.2	Aset Tetap	0
C312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0
C313.2	Barang Berharga	0
C314.2	Aset Non Produksi	0
C31	Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31.1-31.2)	4.555.772.948,418
CSD	Surplus / Defisit Kas (1-2-ADJz-31+CSDz)	249.569.324,385
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN :		
C32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	(205.575.345,934)
C321x	Domestik	(205.575.345,934)
C322x	Luar Negeri	0
C323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	(24.648.907,086)
C331	Domestik	(24.648.907,086)
C332	Luar Negeri	0
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	(230.224.263,020)
NCB	Perubahan Kas Bersih (CSD - C32 + C33)	19.345.071,365

MAPPING NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2015

URAIAN	Konsolidasi Penda	Mapping ke GFS	
		Kode	Klasifikasi GFS
			Jumlah
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	0		0
Kas di Kas Daerah	1.260.084.867,026	A6212	1.260.084.867,026
Kas di Bendahara Penerimaan	1.333.038,020	A6212	1.333.038,020
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.336.822,010	A6212	6.336.822,010
Kas di BLUD	45.107.182,700	A6212	45.107.182,700
Kas Lainnya	51.178.429,218	A6212	51.178.429,218
Setara Kas	3.219.907,542	A6212	3.219.907,542
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.367.260.246,516		1.367.260.246,516
Piutang Pendapatan	502.362.534,583	A6218	502.362.534,583
Piutang Lainnya	126.134.977,645	A6218	126.134.977,645
Penyisihan Piutang	(95.595.767,331)	A6218	FA Domestic Other accounts receivable
Beban Dibayar Dimuka	11.606.448,608	A6218	FA Domestic Other accounts receivable
Investasi Jangka Pendek	0	A6212	FA Domestic Currency and deposits
Persediaan	441.955.600,535	A612	Inventories
Jumlah Aset Lancar	2.353.724.040,556		2.449.319.807,867
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	A6214	FA Domestic Loans
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	A6214	FA Domestic Loans
Dana Bergilir	2.085.013,756	A6214	FA Domestic Loans
Investasi Non Permanen Lainnya	29.573,610	A6214	FA Domestic Loans
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.114.587,366		2.114.587,366
Investasi Jangka Panjang Permanen	0	A6215	FA Domestic Shares and other equity
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.714.341.560,416	A6215	FA Domestic Shares and other equity
Investasi Permanen Lainnya	104.341.938,791	A6215	FA Domestic Shares and other equity
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.818.683.499,207		1.818.683.499,207
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.820.798.086,573		1.820.798.086,573
ASET TETAP			
Tanah	6.473.517.440,033	A6141	Land
Peralatan dan Mesin	4.328.902.959,819	A6112	NonFA Machinery and equipment
Gedung dan Bangunan	11.075.360.384,997	A6111	NonFA Buildings and structures
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.091.220.417,627	A6111	NonFA Buildings and structures
Aset Tetap Lainnya	745.730.643,326	A6113	NonFA Other fixed assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	706.830.517,854	A6111	NonFA Buildings and structures
Akumulasi Penyusutan	(15.351.894,383,736)		
Jumlah Aset Tetap	28.069.667.979,920		43.421.562.363,656

URAIAN	Konsolidasi Pemda	Kode	Mapping ke GFS	
			Klasifikasi GFS	Jumlah
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang				
Tagihan Penjualan Angsuran	1.204.797.637	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	1.204.797.637
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	8.866.488.224	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	8.866.488.224
Jumlah Tagihan Jangka Panjang	10.071.285.861			10.071.285.861
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	646.699.397.638	A6113	NonFA Other fixed assets	646.699.397.638
Aset Tidak Berwujud	33.791.067.404	A6113	NonFA Other fixed assets	33.791.067.404
Aset Lain-lain	1.198.647.820.603	A6111	NonFA Buildings and structures	
		A6113	NonFA Other fixed assets	1.198.647.820.603
		A6213	FA Domestic Securities other than shares	0
		A6214	FA Domestic Loans	0
		A6215	FA Domestic Shares and other equity	0
		A6218	FA Domestic Other accounts receivable	0
Jumlah Aset Lainnya	1.889.209.571.506			1.889.209.571.506
JUMLAH ASET	34.133.399.678.555			49.560.889.829.622
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.754.661.940	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	15.754.661.940
Pendapatan Diterima Dimuka	6.774.380.048	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	6.774.380.048
Utang Belanja	265.362.563.549	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	265.362.563.549
Utang Jangka Pendek Lainnya	176.392.496.197	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	176.392.496.197
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	464.284.101.734			464.284.101.734
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri				
Utang Dalam Negeri Non Perbankan	0	A6313	Liabilities Domestic Securities other than shares	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	17.666.354.370	A6314	Liabilities Domestic Loans	17.666.354.370
Utang Jangka Panjang Pemerintah Daerah Lainnya	0	A6314	Liabilities Domestic Loans	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	0
Jumlah Utang Dalam Negeri	17.666.354.370			17.666.354.370
Utang Jangka Panjang Lainnya	19.027.938.916	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable	19.027.938.916
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	36.694.293.286			36.694.293.286
JUMLAH KEWAJIBAN	500.978.395.020			500.978.395.020
EKUITAS				
EKUITAS	33.632.421.283.535			
JUMLAH EKUITAS	33.632.421.283.535	A6	NET WORTH	49.079.911.434.602

NERACA GFS PEMDA TAHUN 2015		
Kode	Akun GFS	Tahun 2015
A6	NERACA	49.079.911.434.602
A61	ASET NON KEUANGAN	45.742.656.249.836
A611	ASET TETAP	38.827.183.209.268
A6111	Gedung dan Bangunan	31.873.411.320.478
A6112	Mesin dan Peralatan	4.328.902.959.819
A6113	Aset Tetap Lainnya	2.624.868.928.971
	Akumulasi Depresiasi	0
A612	Persediaan	441.955.600.535
A613	Barang Berharga	0
A614	Aset Non Produksi	6.473.517.440.033
A6141	Tanah	6.473.517.440.033
A6142	Sumber Daya energi dan Mineral	0
A6143	Aset yang timbul secara alamiah lainnya	0
A6144	Aset Non Produksi tidak berwujud	0
A62	Aset Keuangan [621+622+623]	3.838.233.579.786
A6202	Uang dan Deposito [6212+6222]	1.367.260.246.516
A6203	Surat Berharga Utang [6213+6223]	0
A6204	Pinjaman[6214+6224]	2.114.587.366
A6205	Ekuitas dan Saham Dana Investasi [6215+6225]	1.818.683.499.207
A6208	Piutang lainnya [6218+6228]	650.175.246.697
A621	Dalam Negeri	3.838.233.579.786
A6212	Uang dan Deposito dalam mata uang domestik	1.367.260.246.516
A6213	Surat berharga utang dalam negeri	0
A6214	Pinjaman dalam negeri	2.114.587.366
A6215	ekuitas dan saham dana investasi dalam negeri	1.818.683.499.207
A6218	Piutang Lainnya dalam negeri	650.175.246.697
A622	Luar Negeri	
A6222	Uang dan Deposito dalam mata uang asing	0
A6223	Surat berharga utang luar negeri	0
A6224	Pinjaman Luar negeri	0
A6225	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Luar Negeri	0
A6228	Piutang Lainnya Luar Negeri	0
A63	Kewajiban [631+632]	500.978.395.020
A6302	Uang dan Deposito [6312+6322]	-
A6303	Surat Berharga Utang[6313+6323]	0
A6304	Pinjaman [6314+6324]	17.666.354.370
A6308	Utang Lainnya [6318+6328]	483.312.040.650
A631	Domestik	500.978.395.020
A6312	Uang dan Deposito Dalam Negeri	0
A6313	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	0
A6314	Pinjaman Dalam Negeri	17.666.354.370
A6318	Utang Lainnya Dalam Negeri	483.312.040.650
A632	Luar Negeri	-
A6322	Uang dan Deposito Luar Negeri	0
A6323	Surat Berharga Utang Luar Negeri	0
A6324	Pinjaman Luar Negeri	0
A6328	Utang Lainnya Luar negeri	0

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Mapping Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Audited)

RINCIAN ANGKA PER KABUPATEN	NAMA KABUPATEN					
	Nama Akun	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sambas	Kab. Sanggau	Kab. Sintang	Kab. Pontianak
A. Pendapatan Pemerintah Daerah						
I. Pendapatan Asli Daerah						
1. Pendapatan Pajak Daerah	1.459.364.274.992	14.185.509.904		28.350.994.077	15.010.686.159	18.705.795.684
2. Pendapatan Retribusi Daerah	120.979.150.801	5.592.778.612		6.058.960.150	6.604.646.301	19.334.653.075
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	66.063.239.683	2.872.113.016		5.335.828.361	22.525.307.493	1.410.803.965
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.135.684.589	62.927.486.248		43.965.146.110	59.852.906.830	14.730.073.448
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.702.542.350.065	85.577.887.780		83.710.928.698	103.993.546.783	54.181.326.172
II. Pendapatan Transfer						
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan						
Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil Pajak	108.019.117.660	23.648.700.350		39.859.287.514	30.232.710.284	11.782.462.300
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	45.457.841.213	6.114.275.813		35.731.000.835	22.988.880.853	5.655.891.120
c. Dana Alokasi Umum	1.405.594.169.000	793.128.760.000		760.206.338.000	868.071.560.000	527.927.949.000
d. Dana Alokasi Khusus	85.584.200.000	174.218.700.000		85.539.908.000	225.169.630.000	154.941.990.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.644.655.327.873	997.110.436.163		921.335.934.349	1.146.462.781.137	700.308.292.420
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
a. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
b. Dana Penyesuaian	720.512.813.348	235.468.714.000		115.709.328.000	177.708.351.000	90.350.374.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	720.512.813.348	235.468.714.000		115.709.328.000	177.708.351.000	90.350.374.000
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi						
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0	58.332.202.294		0	55.907.883.149	41.610.129.678
b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0		64.064.043.354	0	297.615.641
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	0	58.332.202.294		64.064.043.354	55.907.883.149	41.907.745.319
4. Transfer Bantuan Keuangan						
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	0	23.750.400.000		17.381.200.000	12.249.600.000	0
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	0	23.750.400.000		17.381.200.000	12.249.600.000	0
Jumlah Pendapatan Transfer	2.365.168.141.221	1.314.661.752.457		1.118.490.505.703	1.392.328.615.286	832.566.411.739
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah						
1. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
a. Hibah dari Pemerintah Pusat	5.436.451.536	1.049.860.800		1.185.989.124	0	22.500.000
b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	9.393.600.000
c. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	5.436.451.536	1.049.860.800		1.185.989.124	0	9.416.100.000
2. Pendapatan dari Dana Darurat						
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan dari Dana Darurat	0	0		0	0	0
3. Pendapatan Lainnya						
Pendapatan Lain-lain	0	297.615.641		45.474.920.919	2.297.615.641	0
Jumlah Pendapatan Lainnya	0	297.615.641		45.474.920.919	2.297.615.641	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.436.451.536	1.347.476.441		46.660.910.043	2.297.615.641	9.416.100.000
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)	4.073.146.942.822	1.401.587.116.679		1.248.862.344.444	1.498.619.777.710	896.163.837.911
B. Belanja Negara						
I. Belanja Operasi						
1. Belanja Pegawai	794.136.016.148	630.851.550.600		576.676.118.051	511.884.978.848	412.278.977.763
2. Belanja Barang dan Jasa	676.909.112.889	296.298.128.097		222.852.630.509	290.556.585.937	120.837.902.144
3. Belanja Bunga	0	278.736.371		0	504.821.000	0
4. Subsidi	0	0		0	8.378.298.854	0
5. Hibah	1.116.079.095.122	55.787.639.895		16.292.975.000	125.698.018.288	35.818.204.127
6. Bantuan Sosial	1.895.000.000	690.200.000		1.102.059.550	503.500.000	1.461.900.000
Jumlah Belanja Operasi	2.589.019.224.159	983.906.254.963		816.923.783.110	937.526.202.927	570.396.984.034
II. Belanja Modal						
1. Belanja Modal Tanah	1.456.626.719	11.276.505.851		1.390.893.000	2.074.221.554	0
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.653.147.080	38.581.925.645		38.689.963.325	44.840.204.186	32.122.844.840
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.016.395.646	85.145.906.174		31.868.285.808	117.373.449.412	63.205.864.431
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	209.569.078.304	161.024.932.680		47.879.986.550	200.977.221.369	175.878.706.890
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.442.646.450	2.320.048.625		1.828.322.800	1.539.644.116	6.456.744.077
6. Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0		0	0	0
7. Belanja Modal Aset Lainnya	1.404.312.700	0		451.723.000	1.939.355.550	0
Jumlah Belanja Modal	368.542.206.899	298.349.318.975		122.109.174.483	368.744.096.187	277.664.160.238
III. Belanja Tak Terduga						
Belanja Tak Terduga	0	65.179.751		579.206.450	1.412.166.988	2.161.510.391
Jumlah Belanja Tak Terduga	0	65.179.751		579.206.450	1.412.166.988	2.161.510.391
Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III)	2.957.561.431.058	1.282.320.753.689		939.612.164.043	1.307.682.466.102	850.222.654.663
C. Transfer Pemerintah Daerah						
I. Transfer/Bagi Hasil ke Desa						
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	841.282.796.957	1.527.174.321		2.245.433.088	3.365.651.500	0
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.129.040.181	0		1.875.347.786	0	30.707.749.800
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	845.411.837.138	1.527.174.321		4.120.780.874	3.365.651.500	30.707.749.800
II. Transfer Bantuan Keuangan						
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	319.269.800.000	137.380.834.904		0	0	0
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.393.154.883	0		130.708.584.337	170.254.717.520	0
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	657.259.543		994.195.170	0	1.104.755.292
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	320.662.954.883	138.038.094.447		131.702.779.507	170.254.717.520	1.104.755.292
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah	1.166.074.792.021	139.565.268.768		135.823.560.381	173.620.369.020	31.812.505.092
Jumlah Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah (B + C)	4.123.636.223.079	1.421.886.022.457		1.075.435.724.424	1.481.302.835.122	882.035.159.755
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	(50.489.280.257)	(20.298.905.779)		173.426.620.020	17.316.942.588	14.128.678.156
E. Pembiayaan						
I. Penerimaan Pembiayaan						
1. Penggunaan SILPA	134.600.709.762	67.526.103.255		134.530.178.578	202.080.082.928	83.983.124.065
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0		0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0		0	0	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	0	42.497.000.000		0	0	0
5. Penerimaan Kembali Piutang	0	24.058.000		0	209.764.800	0
6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0		(934.866.703)	0	0
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0		0	0	0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0		0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	134.600.709.762	110.047.161.255		133.595.311.875	202.289.847.728	83.983.124.065
II. Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0		0	0	0
2. Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	75.000.000.000	0		3.000.000.000	34.996.000.000	5.000.000.000
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	28.587.832.929		2.796.019.945	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0	0	0
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0		0	0	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	0		0	0	0
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0		0	0	0
8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan ²⁾	0	0		0	0	0
9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga ²⁾	0	0		0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000	28.587.832.929		5.796.019.945	34.996.000.000	5.000.000.000
Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II)	59.600.709.762	81.459.328.326		127.799.291.930	167.293.847.728	78.983.124.065
F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	9.111.429.505	61.160.422.548		301.225.911.951	184.610.790.316	93.111.802.221

Keterangan :

²⁾ Akun-akun Sementara

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Mapping Pemerintah Daerah Tahun

RINCIAN ANGKA PER KABUPATEN					
Nama Akun	Kab. Sekadau	Kab. Kayong Utara	Kab. Kubu Raya	Kota Pontianak	Kota Singkawang
A. Pendapatan Pemerintah Daerah					
I. Pendapatan Asli Daerah					
1. Pendapatan Pajak Daerah	7.203.450.876	3.789.183.384	54.285.086.431	240.452.113.349	24.953.693.976
2. Pendapatan Retribusi Daerah	2.603.292.207	2.294.310.071	6.003.747.900	32.821.997.143	5.754.565.759
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.776.559.660	1.354.084.342	1.724.724.758	9.880.186.144	2.373.951.907
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.926.306.870	5.745.294.371	24.456.213.346	51.554.071.816	65.182.113.521
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	33.509.609.613	13.182.872.167	86.469.772.434	334.708.368.452	98.264.325.165
II. Pendapatan Transfer					
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil Pajak	18.092.540.450	14.629.401.150	20.923.476.400	33.999.537.850	11.728.736.964
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	4.102.270.203	7.636.179.419	17.872.907.558	3.815.424.404	3.817.888.271
c. Dana Alokasi Umum	442.188.681.000	415.875.881.000	732.770.242.000	686.035.831.000	478.943.765.000
d. Dana Alokasi Khusus	72.500.540.000	80.268.730.000	120.386.150.000	7.885.510.000	60.015.730.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	536.884.031.653	518.410.191.569	891.952.775.958	731.736.303.254	554.506.120.235
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
a. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
b. Dana Penyesuaian	69.627.536.000	37.996.352.000	170.479.095.000	182.109.092.000	72.479.941.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	69.627.536.000	37.996.352.000	170.479.095.000	182.109.092.000	72.479.941.000
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi					
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.598.089.453	25.833.639.301	68.564.855.138	176.914.389.761	47.544.799.007
b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	297.615.641	297.615.641	0
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	43.598.089.453	25.833.639.301	68.862.470.779	177.212.005.402	47.544.799.007
4. Transfer Bantuan Keuangan					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	0	1.854.400.000	8.974.000.000	7.287.200.000	0
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	0	1.854.400.000	8.974.000.000	7.287.200.000	0
Jumlah Pendapatan Transfer	650.109.657.106	584.094.582.870	1.140.268.341.737	1.098.344.600.656	674.530.860.242
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah					
1. Pendapatan Hibah					
a. Hibah dari Pemerintah Pusat	24.363.909.023	6.030.775.300	67.074.250.000	92.938.189.362	0
b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
c. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	0	0	0	0
d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	24.363.909.023	6.030.775.300	67.074.250.000	92.938.189.362	0
2. Pendapatan dari Dana Darurat					
Dana Darurat	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan dari Dana Darurat	0	0	0	0	0
3. Pendapatan Lainnya					
Pendapatan Lain-lain	9.573.600.000	0	0	0	3.164.800.000
Jumlah Pendapatan Lainnya	9.573.600.000	0	0	0	3.164.800.000
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	33.937.509.023	6.030.775.300	67.074.250.000	92.938.189.362	3.164.800.000
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)	717.556.775.743	603.308.230.338	1.293.812.364.171	1.525.991.158.470	775.959.985.407
B. Belanja Negara					
I. Belanja Operasi					
1. Belanja Pegawai	238.321.355.287	199.693.688.528	532.825.923.573	622.914.250.698	385.229.970.184
2. Belanja Barang dan Jasa	140.505.816.256	133.220.825.825	335.208.424.250	400.116.692.802	159.409.034.484
3. Belanja Bunga	0	0	0	20.433.512	0
4. Subsidi	54.657.460.840	0	0	0	0
5. Hibah	53.941.955.350	14.669.343.220	4.688.000.000	9.063.230.000	7.515.076.772
6. Bantuan Sosial	1.527.678.250	7.824.804.375	359.834.350	1.902.260.200	1.112.230.000
Jumlah Belanja Operasi	488.954.265.983	355.408.661.948	873.082.182.173	1.034.016.867.212	553.266.361.440
II. Belanja Modal					
1. Belanja Modal Tanah	4.757.153.788	4.773.895.350	0	3.299.748.400	21.061.414.025
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.926.857.257	20.678.071.479	48.404.486.887	40.626.706.290	27.902.709.862
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.201.402.430	56.978.430.107	96.402.402.670	192.792.708.224	42.077.379.489
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.374.203.981	100.169.445.318	210.802.086.350	215.472.704.356	114.323.807.850
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.523.732.800	3.806.762.000	10.540.261.623	8.302.370.325	9.466.910.736
6. Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
7. Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	49.445.000	205.024.250	0
Jumlah Belanja Modal	215.783.350.256	186.406.604.254	366.198.682.530	460.699.261.845	214.832.221.962
III. Belanja Tak Terduga					
Belanja Tak Terduga	1.995.944	1.341.460.773	0	2.682.599.981	423.207.804
Jumlah Belanja Tak Terduga	1.995.944	1.341.460.773	0	2.682.599.981	423.207.804
Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III)	704.739.612.183	543.156.726.975	1.239.280.864.703	1.497.398.729.038	768.521.791.206
C. Transfer Pemerintah Daerah					
I. Transfer/Bagi Hasil ke Desa					
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	338.866.547	0	0	0
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	43.134.173	0	0	0
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0	382.000.720	0	0	0
II. Transfer Bantuan Keuangan					
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	56.352.940.438	68.265.424.002	0	122.400.000
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	544.401.960	911.691.235	1.317.140.000	832.123.126
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	0	56.897.342.398	69.177.115.237	1.317.140.000	954.523.126
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah	0	57.279.343.118	69.177.115.237	1.317.140.000	954.523.126
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH (B + C)	704.739.612.183	600.436.070.093	1.308.457.979.940	1.498.715.869.038	769.476.314.332
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	12.817.163.559	2.872.160.245	(14.645.615.769)	27.275.289.432	6.483.671.075
E. Pembiayaan					
I. Penerimaan Pembiayaan					
1. Penggunaan SILPA	68.491.729.176	36.096.181.261	61.617.261.419	31.206.207.179	49.095.188.563
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	105.000.000	0
5. Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0
6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	68.491.729.176	36.096.181.261	61.617.261.419	31.311.207.179	49.095.188.563
II. Pengeluaran Pembiayaan					
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.140.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	16.258.639.198	5.875.000.000
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	911.100.000	301.979.319	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0
8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan ²⁾	0	0	0	0	0
9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga ⁴⁾	0	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.140.000.000	2.000.000.000	3.411.100.000	16.560.618.517	5.875.000.000
Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II)	61.351.729.176	34.096.181.261	58.206.161.419	14.750.588.662	43.220.188.563
F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	74.168.892.736	36.968.341.506	43.560.545.651	42.025.878.094	49.703.859.639

Keterangan :

²⁾ Akun-akun Sementara

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Mapping Pemerintah Daerah Tahun

RINCIAN ANGA PER KABUPATEN					
Nama Akun	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Ketapang	Kab. Bengkayang	Kab. Landak	Kab. Melawi
A. Pendapatan Pemerintah Daerah					
I. Pendapatan Asli Daerah					
1. Pendapatan Pajak Daerah	20.024.761.516	59.219.129.904	7.894.485.134	9.408.864.503	8.881.409.151
2. Pendapatan Retribusi Daerah	18.716.318.088	6.532.669.563	10.609.109.695	4.073.279.731	1.089.780.483
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.082.191.039	5.345.929.140	2.387.121.556	3.098.589.592	1.105.625.702
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.909.249.553	50.841.274.944	18.573.432.850	30.192.188.025	18.861.733.740
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	69.732.520.196	121.939.003.551	39.464.149.235	46.772.921.850	29.938.549.078
II. Pendapatan Transfer					
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil Pajak	26.481.527.881	59.591.616.150	20.010.232.450	25.682.090.300	20.205.209.274
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	22.889.335.245	88.805.439.813	5.097.562.265	13.404.518.560	25.996.664.948
c. Dana Alokasi Umum	913.007.845.000	1.070.459.827.000	529.863.441.000	619.248.444.000	584.820.744.000
d. Dana Alokasi Khusus	146.688.120.000	174.794.260.000	146.965.190.000	135.272.770.000	116.709.880.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.109.066.828.126	1.393.651.142.963	701.936.425.715	793.607.822.860	747.732.498.222
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
a. Dana Otonomi Khusus	0	0	33.788.893.000	0	0
b. Dana Penyesuaian	166.123.241.000	188.664.192.000	68.012.418.000	89.777.479.000	38.611.254.000
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	166.123.241.000	188.664.192.000	101.801.311.000	89.777.479.000	38.611.254.000
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi					
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.494.641.413	91.290.562.972	37.111.048.626	45.856.876.124	45.157.589.581
b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	11.283.031.226	0	322.562.214	0
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	41.494.641.413	102.573.594.198	37.111.048.626	46.179.438.338	45.157.589.581
4. Transfer Bantuan Keuangan					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	65.597.600.000	0	37.616.200.000	92.352.800.000	0
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	65.597.600.000	0	37.616.200.000	92.352.800.000	0
Jumlah Pendapatan Transfer	1.382.282.310.539	1.684.888.929.161	878.464.985.341	1.021.917.540.198	831.501.341.803
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah					
1. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
a. Hibah dari Pemerintah Pusat	0	7.234.150.745	89.331.671.691	82.464.067.322	533.593.000
b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	44.721.021.000	0
c. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	0	0	0	0
d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	7.234.150.745	89.331.671.691	127.185.088.322	533.593.000
2. Pendapatan dari Dana Darurat					
Dana Darurat	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan dari Dana Darurat	0	0	0	0	0
3. Pendapatan Lainnya					
Pendapatan Lain-lain	297.615.641	0	0	0	65.959.810.000
Jumlah Pendapatan Lainnya	297.615.641	0	0	0	65.959.810.000
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	297.615.641	7.234.150.745	89.331.671.691	127.185.088.322	66.493.403.000
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)	1.452.312.446.376	1.814.062.083.457	1.007.260.806.268	1.195.875.550.369	927.933.293.881
B. Belanja Negara					
I. Belanja Operasi					
1. Belanja Pegawai	443.382.228.395	657.513.692.151	330.499.818.436	399.096.958.575	318.507.339.494
2. Belanja Barang dan Jasa	354.050.877.764	562.902.933.892	254.057.463.029	286.814.308.150	137.261.613.951
3. Belanja Bunga	0	0	0	0	0
4. Subsidi	0	0	0	0	0
5. Hibah	75.768.481.050	52.474.318.505	32.026.272.750	11.655.000.000	105.023.303.068
6. Bantuan Sosial	971.500.000	276.500.000	10.191.762.356	1.060.000.000	2.520.500.000
Jumlah Belanja Operasi	874.173.087.209	1.273.167.444.548	626.775.316.571	698.626.266.725	563.312.756.513
II. Belanja Modal					
1. Belanja Modal Tanah	969.610.000	1.344.100.000	3.779.983.480	3.398.830.800	0
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.984.644.101	43.235.847.472	28.573.528.494	45.933.638.376	32.881.325.935
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.487.662.935	104.905.525.611	92.635.346.273	86.616.369.326	41.604.648.892
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.212.700.294	223.432.783.959	142.520.498.145	284.593.378.204	147.312.627.790
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	956.884.500	1.977.295.500	3.372.649.831	15.819.946.369	2.527.684.500
6. Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
7. Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	465.960.000
Jumlah Belanja Modal	369.611.501.830	374.795.552.543	270.882.406.223	436.362.163.076	224.792.247.117
III. Belanja Tak Terduga					
Belanja Tak Terduga	1.390.333.576	2.394.390.296	1.668.654.870	582.080.398	940.336.793
Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III)	1.245.174.922.615	1.650.357.387.387	899.326.377.664	1.135.570.510.199	789.045.340.423
C. Transfer Pemerintah Daerah					
I. Transfer/Bagi Hasil ke Desa					
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	4.632.450.000	0	0	0
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	612.265.950	0	0	0
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0	5.244.715.950	0	0	0
II. Transfer Bantuan Keuangan					
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	192.828.348.000	59.420.039.347	72.332.321.002	87.569.164.217
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	176.395.120.200	856.547.536	730.066.996	1.310.720.000	599.997.700
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	176.395.120.200	193.684.895.536	60.150.106.343	73.643.041.002	88.169.161.917
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah	176.395.120.200	198.929.611.486	60.150.106.343	73.643.041.002	88.169.161.917
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH (B + C)	1.421.570.042.815	1.849.286.998.873	959.476.484.007	1.209.213.551.201	877.214.502.340
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	30.742.403.561	(35.224.915.416)	47.784.322.260	(13.338.000.832)	50.718.791.541
E. Pembiayaan					
I. Penerimaan Pembiayaan					
1. Penggunaan SILPA	116.344.101.079	147.254.748.809	56.400.318.463	118.701.653.348	5.897.810.519
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
5. Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0
6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	116.344.101.079	147.254.748.809	56.400.318.463	118.701.653.348	5.897.810.519
II. Pengeluaran Pembiayaan					
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	32.875.000.000	0	4.875.000.000	4.000.000.000	11.000.000.000
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	15.000.000.000	907.101.640	694.553.802	0	18.052.319.450
4. Pemberian Pinjaman Daerah	354.662.833	0	0	0	0
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0
8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan ²⁾	0	0	0	0	0
9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga ²⁾	0	0	0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	48.229.662.833	907.101.640	5.569.553.802	4.000.000.000	29.052.319.450
Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II)	68.114.438.246	146.347.647.169	50.830.764.661	114.701.653.348	(23.154.508.931)
F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	98.856.841.807	111.122.731.753	98.615.086.921	101.363.652.516	27.564.282.609

Keterangan :
²⁾ Akun-akun Sementara

LAMPIRAN III

➤ **LKPK-TW**

➤ **MAPPING LSKPU**



Mandau
Senjata khas suku dayak

**MAPPING LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

		Konsolidasi	Mapping ke GFS	
A. Penerimaan				
I. Penerimaan Perpajakan				
1. Pajak Dalam Negeri	7.198.858.285.047	Pendapatan Penerimaan Perpajakan		
2. Pajak Perdagangan Internasional	7.114.302.592.122	Pajak		7.114.302.592.122
	84.555.692.925	Pajak		84.555.692.925
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak				
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	1.469.548.080.772	Penerimaan Negara Bukan Pajak		
	0	Pendapatan Lainnya		0
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	137.336.256.358	Pendapatan Lainnya		137.336.256.358
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.269.254.484.003	Pendapatan Lainnya		1.268.731.481.878
		Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (Aset Tetap)		(523.002.125)
4. Pendapatan BLU	62.957.340.411	Pendapatan Lainnya		62.957.340.411
III. Penerimaan Hibah				
	431.780.028.903	Hibah		431.780.028.903
IV. Pendapatan Transfer				
Bantuan Keuangan	267.063.400.000	Pendapatan Transfer		
		Hibah		267.063.400.000
Jumlah Penerimaan (A.I + A.II + A.III + A.IV)				
	9.367.249.794.723			
B. Belanja Pemerintah				
1. Belanja Pegawai	9.897.137.054.803	Behan		9.897.137.054.803
2. Belanja Barang*	8.668.260.316.108	Kompensasi Pegawai		6.938.253.312.059
		Penggunaan Barang dan Jasa		1.730.007.004.049
		Hibah		0
		Perubahan Persediaan		0
3. Belanja Modal	8.943.605.115.918	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (Aset Tetap)		8.925.291.277.594
		Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (Aset Non Produksi)		18.313.838.324
4. Pembayaran Bunga Utang	803.990.883	Bunga		803.990.883
5. Subsidi	63.035.759.694	Subsidi		63.035.759.694
6. Hibah	1.716.500.913.147	Hibah		1.716.500.913.147
7. Bantuan Sosial	578.402.747.820	Manfaat Sosial		578.402.747.820
8. Belanja Lain-lain	15.643.124.015	Beban Lainnya		15.643.124.015
Transfer Belanja				
Dana Bantuan Keuangan	642.904.653.662	Hibah		642.904.653.662
Jumlah Belanja dan Transfer Pemerintah				
	30.526.293.676.051			21.582.688.560.133
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)				
	(21.159.043.881.328)			

	Konsolidasi	Mapping ke GFS	
D. Pembiayaan			
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.355.726.354.503	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1. Penggunaan SILPA	1.313.825.398.406	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	(1.313.825.398.406)
2. Pencairan Dana Cadangan	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	42.602.000.000	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	42.602.000.000
5. Penerimaan Kembali Piutang	233.822.800	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	(233.822.800)
6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	(934.866.703)	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	934.866.703
7. Pinjaman Luar Negeri	0	Luar Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	0
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	272.125.209.117	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	0
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	204.519.639.198	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	204.519.639.198
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	67.250.907.086	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	(67.250.907.086)
4. Pemberian Pinjaman Daerah	354.662.833	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	354.662.833
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	Luar Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	0
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	0
8. <i>Pembayaran Kegiatan Lanjutan¹⁾</i>	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	0
9. <i>Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga¹⁾</i>	0	Dalam Negeri (Keterjadian Kewajiban Neto)	0
Jumlah Pembiayaan (D.I - D.II)	1.083.601.145.386		
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(20.075.442.735.942)	Dalam Negeri (Akuisisi Neto Aset Keuangan)	(20.075.442.735.942)

*) Termasuk transfer ke pemerintah desa sebesar Rp.

1.730.007.004.049

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

TAHUN 2015

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
TRANSAKSI YANG MEMPERTANGGHI KEKAYAAN BERSIH :		
A1	Pendapatan	9.366.726.792.598
A11	Pajak	7.198.858.285.047
A12	Kontribusi Sosial	0
A13	Hibah	698.843.428.903
A14	Pendapatan Lainnya	1.469.025.078.647
A2	Beban	21.582.688.560.133
A21	Kompensasi Pegawai	9.897.137.054.803
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	6.938.253.312.059
A23	Konsumsi Aset Tetap	0
A24	Bunga	803.990.883
A25	Subsidi	63.035.759.694
A26	Hibah	4.089.412.570.859
A27	Manfaat Sosial	578.402.747.820
A28	Beban Lainnya	15.643.124.015
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	(12.215.961.767.535)
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	(12.215.961.767.535)
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	8.943.082.113.793
A311	Aset Tetap	8.924.768.275.469
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	0
A314	Aset Non Produksi	18.313.838.324
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(21.159.043.881.328)
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(21.183.692.788.414)
A321	Dalam Negeri	(21.183.692.788.414)
A322	Luar Negeri	0
A323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(24.648.907.086)
A331	Dalam Negeri	(24.648.907.086)
A332	Luar Negeri	0
A332	SILPA Konsolidasian	(20.075.442.735.942)
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
		(0)

* Saldo Operasi Neto berjumlah hanya jika Konsumsi Aset Tetap (23) tidak bernilai Nol. Jika tidak, hanya Saldo Operasi Bruto yang akan berjumlah.

LAPORAN ARUS KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TAHUN 2015

Kode	Akun GFS	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	9.366.726.792.598
C11	Pajak	7.198.858.285.047
C12	Kontribusi Sosial	0
C13	Hibah	698.843.428.903
C14	Penerimaan Lainnya	1.469.025.078.647
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	21.582.688.560.133
C21	Kompensasi Pegawai	9.897.137.054.803
C22	Pembelian Barang dan Jasa	6.938.253.312.059
C24	Bunga	803.990.883
C25	Subsidi	63.035.759.694
C26	Hibah	4.089.412.570.859
C27	Manfaat Sosial	578.402.747.820
C28	Pembayaran Lainnya	15.643.124.015
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (1-2-ADJz)	(12.215.961.767.535)
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN (NFAz):		
C31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	8.943.605.115.918
C311.1	Aset Tetap	8.925.291.277.594
C312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0
C313.1	Barang Berharga	0
C314.1	Aset Non Produksi	18.313.838.324
C31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	523.002.125
C311.2	Aset Tetap	523.002.125
C312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0
C313.2	Barang Berharga	0
C314.2	Aset Non Produksi	0
C31	Arus Kas Keluar Neto: Investasi pada Aset Non Keuangan (31=31.1-31.2)	8.943.082.113.793
CSD	Surplus / Defisit Kas (1-2-ADJz-31+CSDz)	(21.159.043.881.328)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN :		
C32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	(205.575.345.934)
C321x	Domestik	(205.575.345.934)
C322x	Luar Negeri	0
C323	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	(24.648.907.086)
C331	Domestik	(24.648.907.086)
C332	Luar Negeri	0
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-32x+33)	(230.224.253.020)
NCB	Perubahan Kas Bersih (CSD - C32 + C33)	(21.389.268.134.347)

**KERTAS KERJA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015**

	<u>Pemerintah Pusat</u>	<u>Pemerintah Daerah</u>	<u>Eliminasi</u>	<u>Konsolidasi</u>
A. Pendapatan Provinsi dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan	5.227.128.846.008	1.971.729.439.039		7.198.858.285.047
1. Pajak Dalam Negeri	5.142.573.153.083	1.971.729.439.039		7.114.302.592.122
2. Pajak Perdagangan Internasional	84.555.692.925	0		84.555.692.925
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	410.223.410.730	1.059.324.670.042		1.469.548.080.772
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0		0
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D	0	137.336.256.358		137.336.256.358
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	347.266.070.319	921.988.413.684		1.269.254.484.003
4. Pendapatan BLU	62.957.340.411	0		62.957.340.411
III. Penerimaan Hibah	0	431.780.028.903		431.780.028.903
IV. Pendapatan Transfer				
1. Dana Perimbangan		16.969.618.576.059	16.969.618.576.059	267.063.400.000
a. Dana Bagi Hasil		14.245.136.102.711	14.245.136.102.711	0
b. Dana Alokasi Umum		1.630.051.917.711	1.630.051.917.711	0
c. Dana Alokasi Khusus		10.828.143.477.000	10.828.143.477.000	0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		1.786.940.708.000	1.786.940.708.000	0
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		2.457.419.073.348	2.457.419.073.348	0
b. Dana Penyesuaian		0	0	0
3. Bantuan Keuangan		2.423.630.180.348	2.423.630.180.348	0
	267.063.400.000	267.063.400.000		267.063.400.000
Jumlah Pendapatan, Hibah dan Transfer (A.I + A.II + A.III + A.IV)	5.637.352.256.738	20.432.452.714.045	16.702.555.176.059	9.367.249.794.723
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	10.343.410.286.391	19.539.978.735.998		29.883.389.022.389
1. Belanja Pegawai	2.843.324.188.072	7.053.812.866.731	9.897.137.054.803	9.897.137.054.803
2. Belanja Barang*	2.567.250.962.080	6.101.009.354.028	8.668.260.316.108	8.668.260.316.108
3. Belanja Modal	4.387.832.167.500	4.555.772.948.418	8.943.605.115.918	8.943.605.115.918
4. Pembayaran Bunga Utang	0	803.990.883	803.990.883	803.990.883
5. Subsidi	0	63.035.759.694	63.035.759.694	63.035.759.694
6. Hibah	0	1.716.500.913.147	1.716.500.913.147	1.716.500.913.147
7. Bantuan Sosial	545.002.968.739	33.399.779.081	578.402.747.820	578.402.747.820
8. Belanja Lain-lain	0	15.643.124.015	15.643.124.015	15.643.124.015

KERTAS KERJA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

II. Transfer ke Daerah			
1. Dana Perimbangan	16.702.555.176,059	642.904.653,662	642.904.653,662
a. Dana Bagi Hasil	14.245.136.102,711	0	0
b. Dana Alokasi Umum	1.630.051.917,711	0	0
c. Dana Alokasi Khusus	10.828.143.477,000	0	0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	1.786.940.708,000	0	0
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	2.457.419,073,348	2.457.419,073,348	0
a. Dana Otonomi Khusus	0	0	0
b. Dana Penyesuaian	33.788.893,000	33.788.893,000	0
3. Bantuan Keuangan	2.423.630.180,348	2.423.630.180,348	0
Dana Bantuan Keuangan	642.904.653,662	642.904.653,662	642.904.653,662
Dana Bantuan Keuangan	642.904.653,662	642.904.653,662	642.904.653,662
Jumlah Belanja dan Transfer (B.I + B.II)	27.045.965.462,450	20.182.883.389,660	16.702.555.176,059
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(21.408.613.205,712)	249.569.324,385	(21.159.043.881,328)
D. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	1.355.726.354,503	1.355.726.354,503
1. Penggunaan SILPA	0	1.313.825.398,406	1.313.825.398,406
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	0	42.602.000,000	42.602.000,000
5. Penerimaan Kembali Pinjaman	0	233.822,800	233.822,800
6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	(934.866,703)	(934.866,703)
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	272.125.209,117	272.125.209,117
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	204.519.639,198	204.519.639,198
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	67.250.907,086	67.250.907,086
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	354.662,833	354.662,833
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
8. <i>Pembayaran Kegiatan Lanjutan¹⁾</i>	0	0	0
9. <i>Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga¹⁾</i>	0	0	0
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II+ D.III)	0	1.083.601.145,386	1.083.601.145,386
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(21.408.613.205,712)	1.333.170.469,771	(20.075.442.735,942)
1.730.007.004,049			

¹⁾ Termasuk transfer ke pemerintah desa sebesar

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 DAN 2014**

Uraian	TA 2015	TA 2014
A. Pendapatan dan Hibah		
I. Pendapatan Perpajakan	7.198.858.285.047	6.343.609.328.440
1. Pajak Dalam Negeri	7.114.302.592.122	6.194.366.370.061
2. Pajak Perdagangan Internasional	84.555.692.925	149.242.958.379
II. Pendapatan Bukan Pajak	1.469.548.080.772	1.277.506.610.416
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	20.415.569.161
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMND	137.336.256.358	0
3. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	1.269.254.484.003	1.224.413.156.903
4. Pendapatan BLU	62.957.340.411	32.677.884.352
III. Pendapatan Hibah	431.780.028.903	14.608.613.713.353
IV. Pendapatan Transfer	267.063.400.000	0
Jumlah Pendapatan, Hibah dan Transfer	9.367.249.794.723	22.229.729.652.209
B. Belanja Pemerintah		
1. Belanja Pegawai	9.897.137.054.803	8.898.534.992.015
2. Belanja Barang	8.668.260.316.108	5.789.846.098.333
3. Belanja Modal	8.943.605.115.918	6.091.412.158.940
4. Pembayaran Bunga Utang	803.990.883	0
5. Subsidi	63.035.759.694	7.358.650.483
6. Hibah	1.716.500.913.147	1.069.809.355.982
7. Belanja Bantuan Sosial	578.402.747.820	705.763.686.498
8. Belanja Lain-lain	15.643.124.015	1.329.662.744.239
Transfer Belanja		
Dana Bantuan Keuangan	642.904.653.662	0
Jumlah Belanja & Transfer	30.526.293.676.051	23.892.387.686.489
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(21.159.043.881.328)	(1.662.658.034.280)
D. Pembiayaan		
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.355.726.354.503	914.207.798.016
1. Penggunaan SilPA	1.313.825.398.406	854.129.651.349
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
4. Pinjaman Dalam Negeri	42.602.000.000	60.078.146.667
5. Penerimaan Kembali Piutang	233.822.800	0
6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	(934.866.703)	0
7. Pinjaman Luar Negeri	0	0
8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	272.125.209.117	245.610.708.066
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	204.519.639.198	161.054.422.738
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	67.250.907.086	68.573.648.028
4. Pemberian Pinjaman Daerah	354.662.833	0
5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0	15.982.637.300
7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
8. Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0
9. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	1.083.601.145.386	668.597.089.950
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(20.075.442.735.942)	(994.060.944.330)

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank		0	0
Kas di Kas Negara dan Kas Daerah	2.547.258.477	1.260.084.867.026	1.262.632.125.503
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.289.059.281	6.336.822.010	7.625.881.291
Kas di Bendahara Penerimaan	137.625.318	1.333.038.020	1.470.663.338
Kas Lainnya dan Setara Kas	59.987.349.275	54.398.336.760	114.385.686.035
Kas pada BLU	25.690.813.681	45.107.182.700	70.797.996.381
Jumlah Kas dan Bank	89.652.106.032	1.367.260.246.516	1.456.912.352.548
Piutang			
Piutang Pajak	596.685.910.537	177.138.835.032	773.824.745.569
Piutang Bukan Pajak	76.975.448.303	97.506.298.245	174.481.746.548
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	60.000.000	787.598.413	847.598.413
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan	0	3.734.434.924	3.734.434.924
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		449.167.070	449.167.070
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		41.595.703.480	41.595.703.480
Piutang dari Kegiatan BLU	0	75.342.603.194	75.342.603.194
Piutang Lain-lain (termasuk Piutang Kekurangan Transfer dan Dana Bagi Hasil)	0	231.942.871.870	231.942.871.870
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(394.922.340.823)	(95.595.767.331)	(490.518.108.154)
Jumlah Piutang	278.799.018.017	532.901.744.897	811.700.762.914
Beban Dibayar Dimuka	1.229.613.788	11.606.448.608	12.836.062.396
Investasi Jangka Pendek	4.000.000.000		4.000.000.000
Persediaan	401.954.984.245	441.955.600.535	843.910.584.780
Jumlah Aset Lancar	775.635.722.082	2.353.724.040.556	3.129.359.762.638
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergilir	0	2.085.013.756	2.085.013.756
Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D)	0	29.573.610	29.573.610
Jumlah Investasi Non Permanen	0	2.114.587.366	2.114.587.366
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN/D	0	1.714.341.560.416	1.714.341.560.416
Investasi Permanen Lainnya	0	104.341.938.791	104.341.938.791
Jumlah Investasi Permanen	0	1.818.683.499.207	1.818.683.499.207
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0	1.820.798.086.573	1.820.798.086.573
Aset Tetap			
Tanah	5.056.603.624.956	6.473.517.440.033	11.530.121.064.989
Peralatan dan Mesin	3.159.265.168.790	4.328.902.959.819	7.488.168.128.609
Gedung dan Bangunan	2.853.943.995.234	11.075.360.384.997	13.929.304.380.231
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.018.319.340.741	20.091.220.417.627	37.109.539.758.368
Aset Tetap Lainnya	1.187.973.730.303	745.730.643.326	1.933.704.373.629
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.121.143.871.980	706.830.517.854	3.827.974.389.834
Akumulasi Penyusutan	(7.960.845.307.857)	(15.351.894.383.736)	(23.312.739.691.593)
Jumlah Aset Tetap	24.436.404.424.147	28.069.667.979.920	52.506.072.404.067
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	0	1.204.797.637	1.204.797.637
Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	84.567.430	8.866.488.224	8.951.055.654
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	646.699.397.638	646.699.397.638
Aset Tak Berwujud	125.328.050.743	33.791.067.404	159.119.118.147
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	1.265.425.281		1.265.425.281
Aset Lain-lain	274.990.895.739	1.198.647.820.603	1.473.638.716.342
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	(100.107.508.544)		(100.107.508.544)
Jumlah Aset Lainnya	301.561.430.649	1.889.209.571.506	2.190.771.002.155
JUMLAH ASET	25.513.601.576.878	34.133.399.678.555	59.647.001.255.433

Uraian	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	15.754.661.940	15.754.661.940
Utang Kepada Pihak Ketiga	58.470.465.219		58.470.465.219
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0		0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Utang Biaya Pinjaman	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	0		0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	6.774.380.048	6.774.380.048
Utang Jangka Pendek Lainnya	65.022.566.377	441.755.059.746	506.777.626.123
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	123.493.031.596	464.284.101.734	587.777.133.330
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Dalam Negeri		17.666.354.370	17.666.354.370
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	19.027.938.916	19.027.938.916
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0	36.694.293.286	36.694.293.286
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	36.694.293.286	36.694.293.286
JUMLAH KEWAJIBAN	123.493.031.596	500.978.395.020	624.471.426.616
Ekuitas	25.390.108.545.282	33.632.421.283.535	59.022.529.828.817
JUMLAH EKUITAS	25.390.108.545.282	33.632.421.283.535	59.022.529.828.817
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.513.601.576.878	34.133.399.678.555	59.647.001.255.433

**NERACA KONSOLIDASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2015**

ASET	Uratan	Konsolidasi Pemerintah Umum	Mapping ke GFS		Jumlah
			Kode	Klasifikasi GFS	
Aset Lancar					
Kas dan Bank		0			0
Kas di Kas Negara dan Kas Daerah		1.262.632.125,503	A6212	FA Domestic Currency and deposits	1.262.632.125,503
Kas di Bendahara Pengeluaran		7.625.881.291	A6212	FA Domestic Currency and deposits	7.625.881.291
Kas di Bendahara Penerimaan		1.470.663.338	A6212	FA Domestic Currency and deposits	1.470.663.338
Kas Lainnya dan Setara Kas		114.385.686,035	A6212	FA Domestic Currency and deposits	114.385.686,035
Kas pada BLU		70.797.996,381	A6212	FA Domestic Currency and deposits	70.797.996,381
Jumlah Kas dan Bank		1.456.912.352,548			1.456.912.352,548
Putang					0
Putang Pajak		773.824.745,569	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	773.824.745,569
Putang Bukan Pajak		174.481.746,548	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	174.481.746,548
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran		847.598,413	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	847.598,413
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan		3.734.434,924	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	3.734.434,924
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		449.167,070	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	449.167,070
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		41.595.703,480	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	41.595.703,480
Putang dari Kegiatan BLU		75.342.603,194	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	75.342.603,194
Putang Lain-lain (termasuk Putang Kekurangan Transfer dan Dana Bagi Hasil)		231.942.871,870	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	231.942.871,870
Penyisihan Putang Tidak Tertagih		(490.518.108,154)			0
Jumlah Putang		811.700.762,914			1.302.218.871,068
Beban Dibayar Dimuka		12.836.062,396	A6218	FA Domestic Other accounts receivable	12.836.062,396
Investasi Jangka Pendek		4.000.000,000	A6212	FA Domestic Currency and deposits	4.000.000,000
Persediaan		843.910,584,780	A612	Inventories	843.910,584,780
Jumlah Aset Lancar		3.129.359.762,638			3.619.877.870,792
Investasi Jangka Panjang					
Investasi Non Permanen		0	A6214	FA Domestic Loans	0
Dana Bergulir		2.085.013,756	A6214	FA Domestic Loans	2.085.013,756
Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D)		29.573,610	A6214	FA Domestic Loans	29.573,610
Jumlah Investasi Non Permanen		2.114.587,366			2.114.587,366
Investasi Permanen		0	A6215	FA Domestic Shares and other equity	0
Investasi Permanen PMN/D		1.714.341.560,416	A6215	FA Domestic Shares and other equity	1.714.341.560,416
Investasi Permanen Lainnya		104.341.938,791	A6215	FA Domestic Shares and other equity	104.341.938,791
Jumlah Investasi Permanen		1.818.683.499,207			1.818.683.499,207
Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.820.798.086,573			1.820.798.086,573

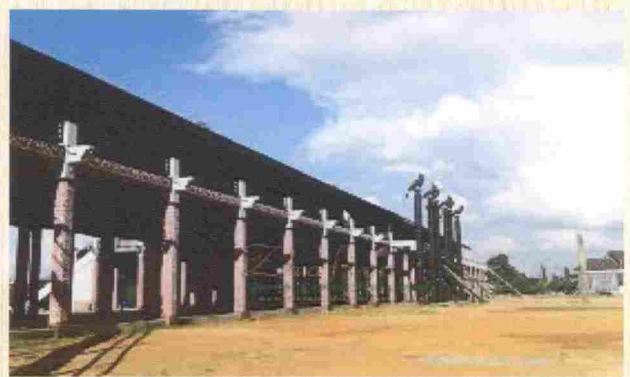
Aset Tetap	Uraian	Konsolidasi Pemerintah Umum	Kode	Mapping ke GFS		Jumlah
				Klasifikasi GFS		
	Tanah	11.530.121.064.989	A6141	Land		11.530.121.064.989
	Peralatan dan Mesin	7.488.168.128.609	A6112	NonFA Machinery and equipment		7.488.168.128.609
	Gedung dan Bangunan	13.929.304.380.231	A6111	NonFA Buildings and structures		13.929.304.380.231
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.109.539.758.368	A6111	NonFA Buildings and structures		37.109.539.758.368
	Aset Tetap Lainnya	1.933.704.373.629	A6113	NonFA Other fixed assets		1.933.704.373.629
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.827.974.389.834	A6111	NonFA Buildings and structures		3.827.974.389.834
	Akumulasi Penyusutan	(23.312.739.691.593)	A6111	NonFA Buildings and structures		
	Jumlah Aset Tetap	52.506.072.404.067				75.818.812.095.660
Dana Cadangan						
	Dana Cadangan	0	A6212	FA Domestic Currency and deposits		0
	Jumlah Dana Cadangan	0				0
Aset Lainnya						
	Tagihan Penjualan Angsuran	1.204.797.637	A6218	FA Domestic Other accounts receivable		1.204.797.637
	Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	8.951.055.654	A6218	FA Domestic Other accounts receivable		8.951.055.654
	Kemitaan Dengan Pihak Ketiga	646.699.397.638	A6113	NonFA Other fixed assets		646.699.397.638
	Aset Tak Berwujud	159.119.118.147	A6113	NonFA Other fixed assets		159.119.118.147
	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	1.265.425.281	A6212	FA Domestic Currency and deposits		1.265.425.281
	Aset Lain-lain	1.473.638.716.342	A6113	NonFA Other fixed assets		1.473.638.716.342
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	(100.107.508.544)				(100.107.508.544)
	Jumlah Aset Lainnya	2.190.771.002.155				2.190.771.002.155
JUMLAH ASET KEWAJIBAN		59.647.001.255.433				83.450.259.055.180
Kewajiban Jangka Pendek						
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	15.754.661.940	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable		15.754.661.940
	Utang Kepada Pihak Ketiga	58.470.465.219	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable		58.470.465.219
	Pendapatan Diterima Dimuka	6.774.380.048	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable		6.774.380.048
	Utang Jangka Pendek Lainnya	506.777.626.123	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable		506.777.626.123
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	587.777.133.330				587.777.133.330
Kewajiban Jangka Panjang						
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri					
	Utang Dalam Negeri	17.666.354.370	A6314	Liabilities Domestic Loans		17.666.354.370
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	19.027.938.916	A6318	Liabilities Domestic Other accounts payable		19.027.938.916
	Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	36.694.293.286				36.694.293.286
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	36.694.293.286				36.694.293.286
JUMLAH KEWAJIBAN		624.471.426.616				624.471.426.616
Ekuitas						
	Jumlah Ekuitas Dana	59.022.529.828.817				82.825.787.628.564
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	59.647.001.255.433	A6	NET WORTH		83.450.259.055.180

Cross Check Balancing

0

0

Kode	Akun GFS	Tahun 2015	Tahun 2014	Kenaikan/Penurunan
A6	NERACA	82.925.895.137.108	56.202.274.602.563	24.481.553.835.957
A61	ASET NON KEUANGAN	78.942.179.912.567	53.540.888.293.263	23.159.224.920.716
A611	ASET TETAP	66.568.148.262.798	52.696.740.788.231	17.886.096.649.929
A6111	Gedung dan Bangunan	54.866.818.528.433	39.603.276.461.119	15.263.542.067.314
A6112	Mesin dan Peralatan	7.488.168.128.609	8.953.877.547.146	(1.465.709.418.537)
A6113	Aset Tetap Lainnya	4.213.161.605.756	1.273.424.430.800	2.939.737.174.956
	Akumulasi Depresiasi	0	(1.148.526.826.196)	1.148.526.826.196
A612	Persediaan	843.910.584.780	554.171.215.426	289.739.369.354
A614	Aset Non Produksi	11.530.121.064.989	6.546.732.163.556	4.983.388.901.433
A6141	Tanah	11.530.121.064.989	6.546.732.163.556	4.983.388.901.433
A6142	Sumberdaya Energi dan Mineral	0		0
A62	Aset Keuangan [621+622+623]	4.608.186.651.157	3.296.254.399.579	1.311.932.251.578
A6202	Uang dan Deposito [6212+6222]	1.462.177.777.829	844.147.505.032	618.030.272.797
A6203	Surat Berharga Utang [6213+6223]	0	0	0
A6204	Pinjaman [6214+6224]	2.114.587.366	13.775.660.065	(11.661.072.699)
A6205	Ekuitas dan Saham Dana Investasi [6215+6225]	1.818.683.499.207	1.469.472.515.845	349.210.983.362
A6208	Piutang Lainnya [6218+6228]	1.325.210.786.755	968.858.718.637	356.352.068.118
A621	Domestik	4.608.186.651.157	4.608.186.651.157	1.311.932.251.578
A6212	Uang dan Deposito dalam mata uang domestik	1.462.177.777.829	844.147.505.032	618.030.272.797
A6213	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	0	0	0
A6214	Pinjaman Dalam Negeri	2.114.587.366	13.775.660.065	(11.661.072.699)
A6215	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Dalam nege	1.818.683.499.207	1.469.472.515.845	349.210.983.362
A6218	Piutang Lainnya dalam Negeri	1.325.210.786.755	968.858.718.637	356.352.068.118
A622	Luar Negeri		0	
A6222	Uang dan Deposito dalam Mata Uang Asing	0	0	0
A6223	Surat Berharga Utang Luar Negeri	0	0	0
A6224	Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
A6225	Shares and other equity	0	0	0
A6228	Piutang Liannya Luar Negeri	0		0
A623	Monetary gold and SDRs	0	0	0
A63	Kewajiban [631+632]	624.471.426.616	634.868.090.279	(10.396.663.663)
A6302	Uang dan Deposito [6312+6322]	0	0	0
A6303	Surat Berharga Utang [6313+6323]	0	0	0
A6304	Pinjaman [6314+6324]	17.666.354.370	39.923.826.131	(22.257.471.761)
A6305	Ekuitas dan Saham Dana Investasi [6315+6325]	0	0	0
A6308	Utang Lainnya [6318+6328]	606.805.072.246	594.944.264.148	11.860.808.098
A631	Domestik	624.471.426.616	634.868.090.279	(10.396.663.663)
A6312	Uang dan Deposito dalam mata uang domestik	0	0	0
A6313	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	0	0	0
A6314	Pinjaman Dalam Negeri	17.666.354.370	39.923.826.131	(22.257.471.761)
A6315	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Dalam nege	0	0	0
A6318	Utang Lainnya dalam Negeri	606.805.072.246	594.944.264.148	11.860.808.098
A632	Luar Negeri	0	0	0
A6322	Uang dan Deposito Luar Negeri	0	0	0
A6323	Surat Berharga Utang Luar Negeri	0	0	0
A6324	Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
A6325	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Luar Negeri	0	0	0
A6328	Utang Lainnya Luar negeri	0	0	0



Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat
JI.K.S. Tubun No.36 Pontianak